



**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

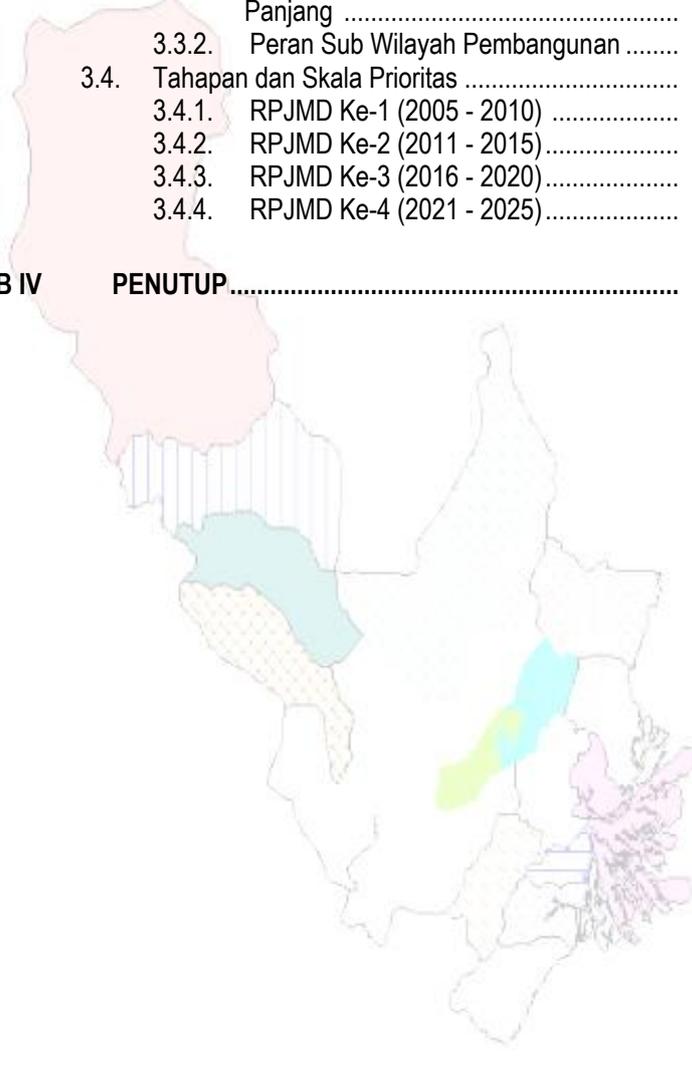
DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	v
Maping.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara	1
1.1.2. Pengertian RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	3
1.1.3. Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Hubungan Antara RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH.....	10
2.1. Kondisi dan Analisis.....	10
2.1.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup ...	10
A. Input	10
1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif	10
2. Topografi	10
3. Klimatologi dan Hidrologi	11
4. Fisiografi.....	11
5. Geologi.....	11
6. Jenis Tanah	11
7. Kemampuan Tanah	12
8. Penggunaan Lahan.....	12
9. Lingkungan Hidup	13
B. Permasalahan	13
C. Capaian Keberhasilan	14
D. Analisis.....	14
* Proyeksi Peluang	14
* Proyeksi Ancaman	15

	* Proyeksi Permasalahan	15
	* Proyeksi Keberhasilan	16
	E. Output.....	16
2.1.2.	Demografi	17
	A. Input	17
	1. Penduduk	17
	2. Pembangunan Manusia	18
	B. Permasalahan	19
	C. Capaian Keberhasilan	20
	D. Analisis	20
	* Proyeksi Peluang	20
	* Proyeksi Ancaman	20
	* Proyeksi Permasalahan	20
	* Proyeksi Keberhasilan	21
	E. Output.....	21
2.1.3.	Ekonomi dan Keuangan Daerah	22
	A. Input	22
	1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	22
	2. PDRB Per-Kapita	23
	3. Struktur Perekonomian Daerah	24
	4. Inflasi Daerah	27
	5. Keuangan Daerah	29
	6. Investasi Daerah	29
	B. Permasalahan	30
	C. Capaian Keberhasilan	30
	D. Analisis	31
	* Proyeksi Peluang	31
	* Proyeksi Ancaman	31
	* Proyeksi Permasalahan	32
	* Proyeksi Keberhasilan	32
	E. Output.....	33
2.1.4.	Sosial Budaya dan Politik	33
	A. Input	33
	1. Kesehatan	33
	2. Pengangguran	34
	3. Angkatan Kerja	34
	4. Pendidikan	35
	5. Kesejahteraan Sosial	36
	6. Kematian Bayi.....	36
	7. Lapangan Kerja.....	37
	8. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	37

	9. Agama.....	37
	10. Politik.....	37
	11. Generasi Muda	38
	12. Kesenian dan Kebudayaan	38
	13. Pariwisata.....	39
	14. Komunitas Adat Terpencil	39
	B. Permasalahan	39
	C. Capaian Keberhasilan	40
	D. Analisis	41
	* Proyeksi Peluang	41
	* Proyeksi Ancaman	42
	* Proyeksi Permasalahan	42
	* Proyeksi Keberhasilan	43
	E. Output.....	43
2.1.5.	Prasarana dan Sarana	43
	A. Input	43
	1. Sarana Jalan dan Jembatan	43
	2. Pos dan Telekomunikasi	44
	3. Lembaga Keuangan.....	44
	4. Koperasi.....	44
	5. Listrik dan Air Bersih	45
	B. Permasalahan	45
	C. Capaian Keberhasilan	45
	D. Analisis	46
	* Proyeksi Peluang	46
	* Proyeksi Ancaman	46
	* Proyeksi Permasalahan	46
	* Proyeksi Keberhasilan	46
	E. Output.....	47
2.1.6.	Pemerintahan	47
	A. Input	47
	1. Aparatur Pemerintah	47
	2. Kelembagaan.....	48
	B. Permasalahan	48
	C. Capaian Keberhasilan	49
	D. Analisis	49
	* Proyeksi Peluang	49
	* Proyeksi Ancaman	49
	* Proyeksi Permasalahan	50
	* Proyeksi Keberhasilan	50
	E. Output.....	50
2.2.	Prediksi Kondisi Umum Daerah	51

BAB III	VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH .	53
3.1.	Visi Pembangunan Daerah	53
3.2.	Misi Pembangunan Daerah	55
3.3.	Arah dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara	56
3.3.1.	Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang	56
3.3.2.	Peran Sub Wilayah Pembangunan	62
3.4.	Tahapan dan Skala Prioritas	65
3.4.1.	RPJMD Ke-1 (2005 - 2010)	66
3.4.2.	RPJMD Ke-2 (2011 - 2015).....	66
3.4.3.	RPJMD Ke-3 (2016 - 2020).....	67
3.4.4.	RPJMD Ke-4 (2021 - 2025).....	68
BAB IV	PENUTUP.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Prediksi Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin, Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Penyaluran Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025.....	18
Tabel 2.2.	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Migas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025.....	23
Tabel 2.3.	Prediksi Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Dalam Milliar Rupiah).....	27
Tabel 2.4.	Prediksi Laju Inflasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Dalam Persen) ...	28
Tabel 2.5.	Prediksi Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Dalam Persen)	40

LAMPIRAN

Mapping Kebijakan Misi 1

Mapping Kebijakan Misi 2

Mapping Kebijakan Misi 3

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara

- A. Kerajaan Kutai Martadipura yang terletak di Kecamatan Muara Kaman sekarang merupakan cikal bakal Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerajaan tertua di Indonesia ini terkenal dengan rajanya yaitu Mulawarman. Selain Kerajaan Kutai, pada abad ke 13 di Tepian Batu (sekarang dikenal dengan Kutai Lama di Kecamatan Anggana) berdiri sebuah Kerajaan yakni Kerajaan Kutai Kartanegara dengan rajanya yang pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300 – 1325).

Pada abad ke 16 terjadi peperangan antar dua kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah raja Aji Pangeran Sinum Panji Menapa berhasil menaklukkan Kutai Martadipura. Raja kemudian mengganti nama kerajaan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pada abad ke 17 agama Islam masuk diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara sehingga sebutan rajapun diganti dengan Sultan. Sultan Kutai Kartanegara pertama kali adalah Sultan Aji Muhammad Idris (1735 – 1778).

Tahun 1732, ibukota Kerajaan Kutai Kartanegara berpindah dari Kutai Lama ke Pamarangan. Sultan Aji Muhammad Idris pada tahun 1779 gugur setelah membantu kerajaan Wajo berperang melawan Belanda. Setelah wafatnya Aji Muhammad Idris terjadi perebutan kekuasaan oleh Aji Kado, yang langsung menamakan dirinya Sultan Aji Muhammad Aliyoedin. Putera Aji Muhammad Idris bernama Aji Imbut yang merupakan putra mahkota kerajaan saat itu masih kecil.

Setelah dewasa Aji Imbut berhasil kembali merebut tahta kerajaan pada tahun 1780 dan dinobatkan sebagai Sultan

dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Aji Imbut bergelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin pada tanggal 28 September 1782 memindahkan ibukota kerajaan ke Tepian Pandan yang kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti Rumah Raja, selanjutnya lama kelamaan menjadi Tenggarong.

Tanggal 28 September 1782 tersebut ditetapkan sebagai berdirinya Kota Tenggarong dan setiap tahun selalu diperingati.

Pada tahun 1823 Kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin setelah Aji Imbut wafat. Pada tahun 1850 beliau diganti oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850 – 1899), tahun 1899 Sultan AM Sulaiman dan wafat diganti oleh Putera Mahkota Aji Muhammad dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alimuddin. Tahun 1899 Sultan wafat, berhubung Putera Mahkota Aji Kaget masih belum dewasa, maka kepemimpinan dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegara. Setelah dewasa, pada tahun 1920 Aji Kaget dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit.

Setelah dihapuskan kerajaan Kutai Kartanegara, pada tanggal 22 September 2001 Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dihidupkan kembali dan Putera Mahkota Haji Aji Pangeran Praboe Anom Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II.

- B. Pada tanggal 11 Oktober 1844, Kerajaan Kutai Kartanegara mengakui pemerintahan Hindia Belanda yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian oleh Sultan AM Sulaiman dengan Pemerintah Hindia Belanda.
- C. Pada tahun 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara beralih status menjadi Daerah Swapraja Kutai dan masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.
- D. Pada tahun 1953 ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat

kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953.

- E. Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 status Daerah Istimewa Kutai dicabut dan menjadi daerah Swatantra yang dipecah menjadi beberapa kota, yaitu: (1) Kotapraja Balikpapan yang beribukota di Balikpapan; (2) Kotapraja Samarinda yang beribukota di Samarinda; dan (3) Daerah Tingkat II Kutai yang beribukota di Tenggarong.
- F. Pada tahun 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Kabupaten daerah Tingkat II Kutai menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan Otonomi Daerah.
- G. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: (1) Kabupaten Kutai Barat; (2) Kabupaten Kutai Kartanegara; (3) Kabupaten Kutai Timur; dan (4) Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 nama Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ibukota kabupaten di Tenggarong. Pola pembangunan pada masa otonomi daerah dilaksanakan dalam kerangka Program Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU) tahap pertama, dengan fokus pengembangan pada: (1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; (2) Pemberdayaan Wilayah Pedesaan; dan (3) Pemberdayaan Wilayah Perkotaan.

1.1.2. Pengertian RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan komprehensif Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 20 tahun yang memuat kondisi umum, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Proses Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: Tahap *Pertama*, penyiapan rancangan RPJPD oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi,

dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Tahap *Kedua*, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Tahap *Ketiga*, penyusunan rancangan akhir RPJPD berdasarkan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Tahap *Keempat*, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh komponen (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Tujuan

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dalam waktu dua puluh tahun.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dan sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program kepala daerah.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Kutai.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009.

1.4. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

- A. RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025 merupakan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2005-2025. RPJPD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap memperhatikan arah RPJP Nasional dan Propinsi, dan selanjutnya berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan mengacu, merujuk, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJP Propinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang (RTR) Propinsi, RTRW dan RTR Pulau. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.
- C. Dokumen RTRW Nasional memberikan gambaran struktur ruang nasional di mana Kota Tenggarong sebagai ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan PKL tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Pusat jasa-jasa keuangan (bank) yang melayani kabupaten atau melayani beberapa kecamatan; 2) Pusat pengelolaan atau pengumpulan barang secara kabupaten meliputi beberapa kecamatan; 3) Simpul transportasi untuk satu kabupaten atau untuk beberapa kecamatan; 4) Bersifat khusus karena mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.

Kedudukan Kota Tenggarong berada pada hirarki fungsi ruang yang dilayani oleh Samarinda (sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah) dan Balikpapan (sebagai Pusat Kegiatan Nasional) yang terletak pada Delta Sungai Mahakam.

- D. RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2001 – 20012 memberikan arahan pembangunan wilayahnya dalam 3 (tiga) Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT), yaitu Wilayah Pantai/Pesisir yang membawahi 6 (enam) kecamatan, Wilayah Kutai Tengah yang membawahi 6 (enam) kecamatan, Wilayah Kutai Hulu yang membawahi 6 (enam) kecamatan. Selanjutnya dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara menjelaskan pentingnya pengembangan 3 (tiga) sentra pusat produksi dalam kerangka pembangunan daerah yang mencakup: (1) Sentra Produksi Pertanian dalam Arti Luas; (2) Sentra Produksi Industri dan Pertambangan; serta (3) Sentra Produksi Pariwisata. Di masing-masing sentra produksi tersebut terdapat sektor-sektor yang menjadi andalan dan dapat diunggulkan pengembangannya. Penguatan pada sektor-sektor tersebut dapat mendorong keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional.
- E. Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih operasional, yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Nomor 180.188/HK/2005) memuat visi dan misi daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan meliputi visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: "Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten yang Baik dan Bersih Berlandaskan Asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman, dan Demokrasi Menuju Terbentuknya Masyarakat yang Berkualitas, Maju, Mandiri, dan Sejahtera." Sedangkan misi pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: (1) Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum; (2) Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi; (3) Perberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi. RPJM merupakan tahapan dalam pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, secara horizontal RPJPD tersinkronisasi dengan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya pada tingkat yang setara.

- F. Dokumen RPJM selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi RENSTRA SKPD.
- G. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dokumen lainnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta diupayakan pencapaiannya, mencakup aspek pembangunan dari segala bidang kehidupan, baik sebagai daerah otonom maupun sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penyusunan RPJP, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah dengan dokumen lainnya dan sistematika penulisan

Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum

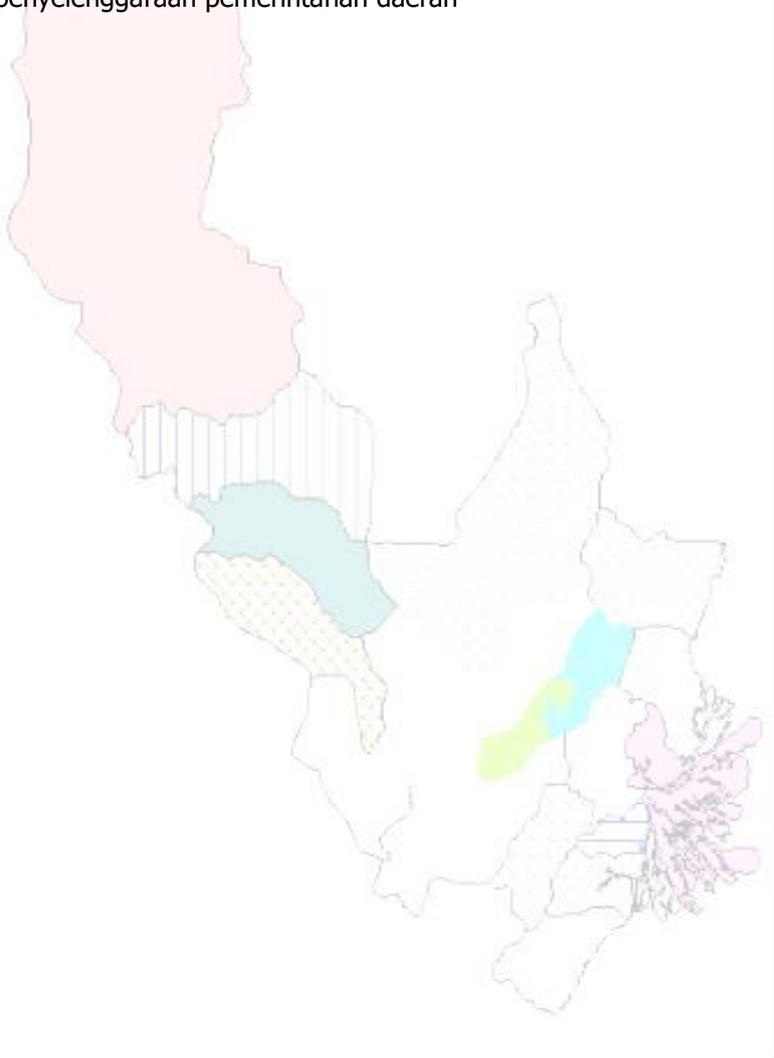
Berisi Kondisi, analisis dan prediksi kondisi daerah yang meliputi kondisi fisik daerah, kondisi kependudukan, bidang perekonomian, bidang pertanian, bidang sosial budaya, bidang politik, hukum dan pemerintahan, serta bidang sarana dan prasarana.

Bab III Visi, Misi, dan Arah Pembangunan

Berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah yang meliputi arahan umum Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan peranan sub wilayah pembangunan.

Bab IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan bahwa RPJPD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah



BAB II
KONDISI, ANALISIS DAN
PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI DAN ANALISIS

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

A. Input:

1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis terletak pada posisi antara 115° 37' 43,004" Bujur Timur dan antara 1° 27' 13,7" Lintang Utara sampai dengan 1° 8' 19,82" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 27.263,10 Km² atau 2.726.310 Ha (12,89 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Timur), mempunyai batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Samarinda.
- Sebelah Timur : Selat Makasar, Samarinda.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan, Samarinda.
- Sebelah Barat: Kabupaten Kutai Barat, Samarinda.

2. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas wilayah pantai dan daratan. Wilayah pantai berada di bagian timur wilayah kabupaten mempunyai ketinggian berkisar 0-7 m dari permukaan laut (dpl). Luas wilayah pantai ini merupakan 22,87 persen dari total wilayah kabupaten. Sifat fisik dari wilayah seperti ini mempunyai ciri utama selalu tergenang, bersifat organik dan asam, serta tersebar di bagian pantai atau bagian timur.

Ketinggian antara 7-25 m mempunyai luas 26,48 persen dari total wilayah kabupaten dengan sifat wilayah berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah.

Wilayah daratan dengan ketinggian 25-100 m dari permukaan laut merupakan areal yang paling luas, yaitu sekitar 29,85 persen dari total wilayah. Sedangkan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut adalah mencakup 11,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun ketinggian lebih dari 500

meter dari permukaan laut adalah 9,27 persen dari luas wilayah kabupaten.

3. Klimatologi dan Hidrologi

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Kondisi iklim ini dipengaruhi oleh letak geografis, yakni iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26⁰ C, di mana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5⁰-7⁰ C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun.

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

4. Fisiografi

Dilihat dari fisiografinya, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) satuan fisiografi, yaitu: (1) rawa pasang surut (tidak swamp); (2) dataran alluvial (alluvial plain); (3) jalur kelokan sungai (meander belt); (4) rawa (swamp); (5) lembah alluvial (alluvial valley); (6) teras (terrain); (7) dataran (plain); (8) perbukitan (hill); dan (9) pegunungan (mountain).

5. Geologi

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar adalah batuan alluvium yang terdiri dari pasir lumpur dan kerikil. Di samping itu, terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan kwarter. Formasi ini terdiri dari batuan paleogen, pamaluan beds, pulau balang beds, Balikpapan (Kutai beds), Kampung Baru, dan dumaring beds.

6. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kondisi iklimnya yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida pada umumnya tergolong tanah yang bereaksi asam dengan jenis tanah meliputi (1) podsolik (ultisol); (2) alluvial (entisol); (3) gleisol (entisol); (4) organosol (histosol); (5) lithosol (entisol); (6) latosol (ultisol); (7) andosol (incepsol); (8) regosol (entisol); (9) renzina (mollisol); dan mediteran (inceptisol).

7. Kemampuan Tanah

Kemampuan tanah dapat diartikan sebagai kapasitas tanah untuk berproduksi, tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang panjang, atau dapat juga diartikan sebagai pengklasifikasian tanah yang didasarkan pada faktor-faktor penghambat kerusakan tanah. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan ini adalah faktor-faktor fisik tanah yang bersifat permanen dan sulit diubah oleh campur tangan manusia, yaitu kemiringan tanah, kedalaman tanah, tekstur, drainase, tingkat erosi, serta faktor-faktor pembatas fisik tanah lainnya. Secara lebih spesifik, faktor-faktor fisik penentu kemampuan tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Lereng (kemiringan tanah), dikelompokkan dalam 4 (empat) kelas, yaitu: 0-2 persen, 2-15 persen, 15-40 persen, dan lebih dari 40 persen.
- (2) Kedalaman tanah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelas, yaitu: kurang dari 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, dan lebih dari 90 cm dari permukaan tanah mineral.
- (3) Drainase tanah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu: tidak pernah tergenang, tergenang periodik, dan tergenang sepanjang tahun.
- (4) Tingkat erosi dikelompokkan dalam 2 (dua) kelas, yaitu: erosi dan tidak ada erosi.
- (5) Faktor pembatas fisik tanah lainnya ditentukan oleh faktor-faktor khusus yang dapat mengurangi produktifitas tanah yang terdapat pada tanah setempat.

8. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya mengikuti penyebaran penduduk. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat pada lokasi-lokasi yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti pusat perdagangan, pusat industri, dan lokasi transmigrasi. Daerah-daerah tersebut pada umumnya telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari wilayah permukiman (luas 16.039 Ha atau 0,61 persen), sawah (luas 53.437 Ha atau 2,05 persen), tegalan atau pertanian lahan kering (luas 183.807 Ha atau 3,97 persen), kebun campuran dan tegalan (luas 41.489 Ha atau 1,59 persen), perkebunan (luas 34.812 Ha atau 1,33 persen), hutan (luas 1.858.237 Ha atau 71,15 persen), danau atau rawa (luas masing-masing 58.441 Ha atau 2,24 persen dan 12.082 Ha atau 0,46 persen), serta wilayah

ladang, semak, dan alang-alang seluas 433.346 Ha atau 16,59 persen dari total luas wilayah.

Penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dari waktu ke waktu mengalami perubahan, disebabkan oleh adanya aktivitas manusia, yang diantaranya meliputi kegiatan eksploitasi hutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), kegiatan berpindah oleh petani tradisional, pertumbuhan industri dan pertambangan, serta pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, kegiatan-kegiatan ini akan merubah penggunaan tanah dari tahun ke tahun, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Perubahan penggunaan lahan yang cepat terjadi adalah perubahan hutan lebat menjadi hutan belukar dan perubahan hutan lebat menjadi perladangan, alang-alang dan semak belukar. Sedangkan pada daerah-daerah yang penduduknya sudah menetap, seperti di sekitar pusat kecamatan dan desa atau kelurahan, akan terjadi perubahan penggunaan tanah dari perladangan dan hutan belukar menjadi pertanian menetap dan kebun campuran.

9. Lingkungan Hidup

Pemanfaatan lahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan hutan lindung berada di daerah Tabang, Kebang Janggut, dan Loa Kulu. Sedangkan pemanfaatan lahan bergambut berada di daerah Kembang Janggut yang terdiri dari beberapa konsesi kehutanan, pertambangan migas, dan pertambangan umum. Pemanfaatan lahan sebagai kawasan sempadan terdapat di sepanjang pantai Muara Badak, Muara Jawa, dan Semboja. Sekitar 2,62 persen kawasan budidaya kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari kawasan budidaya kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur. Lebih lanjut, 7,41 persen kawasan budidaya pertanian dan 12,75 persen kawasan budidaya palawija buah-buahan Propinsi Kalimantan Timur berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 2,12 persen merupakan kawasan budidaya perkebunan, 22,62 persen kawasan budidaya perikanan laut, dan 23,12 persen air tawar dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Permasalahan:

- Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak yang mendiami daerah pedalaman tidak dialokasikan sebagai kawasan pemukiman.

- Pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.
- Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
- Dari peta fisiografi dapat dilihat bahwa wilayah rawa, perbukitan, dan pegunungan merupakan bagian wilayah yang besar (49,35 persen dari total wilayah kabupaten) dan merupakan kendala dalam memanfaatkan potensi yang ada serta diperlukan dana yang besar untuk mengelolanya.

C. Capaian Keberhasilan:

- Terwujudnya kawasan sentra produksi yang meliputi kawasan sentra produksi hasil hutan, kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, kawasan sentra produksi tanaman perkebunan, kawasan sentra produksi perikanan, kawasan wisata alam dan wisata budaya, serta kawasan industri dan pertambangan.
- Hasil pemanfaatan SDA dalam pembangunan telah menyumbang sebesar 76,67 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 7,9 persen terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Terwujudnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pemekaran wilayah yang diharapkan dapat menjadi pedoman, pengarah, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta selanjutnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan rencana tata ruang yang lebih rinci.

D. Analisis:

*** Proyeksi Peluang:**

- Pemanfaatan lahan di wilayah pantai dan DAS Mahakam yang memiliki kemiringan datar sampai landai dengan curah hujan tinggi dan penyebaran merata sepanjang tahun cocok untuk pengembangan perikanan, pertanian tanaman pangan, dan perkebunan.
- Berdasarkan analisis kemampuan lahan diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat kemampuan lahan sedang sampai tinggi, sehingga sangat mendukung untuk peningkatan atau pengembangan

berbagai jenis kegiatan, baik yang bersifat budidaya maupun non-budidaya.

- Kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 25 tahun mendatang agar daerah tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, pangan, dan energi.
- Areal hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai kurang lebih 83,31 persen dari luas wilayah kabupaten. Dari Areal hutan tersebut, sekitar 52,34 persen merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap melestarikan dan menjaga lingkungan hidup.

*** Proyeksi Ancaman:**

- Kondisi wilayah pantai dan dataran rendah yang tergenang dapat merupakan sumber berbagai penyakit, sedangkan kawasan pegunungan yang memiliki curah hujan tinggi apabila tidak terjaga ekosistemnya dapat mengakibatkan bencana alam.
- Degradasi Delta Mahakam akibat aktivitas petani tambak dan aktivitas minyak dan gas, sehingga daerah penyangga dan plasma nutfah pesisir pantai yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara terancam musnah dan dikhawatirkan berdampak pada kondisi lingkungan.
- Kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan alam, polusi, daya dukung alam, dan permasalahan lain yang terkait dengan space of life menjadi strategis untuk dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan.
- Kondisi daya dukung alam yang semakin menurun yang ditunjukkan oleh ketersediaan SDA yang semakin menurun.
- Tingkat percepatan kerusakan hutan yang cukup tinggi akibat maraknya penebangan liar, perambahan lahan hutan, dan areal bekas pertambangan.
- Timbulnya bencana alam yang diakibatkan oleh eksploitasi SDA (khususnya di sektor pertambangan dan galian serta kehutanan) yang kurang memperhatikan keseimbangan fungsi-fungsi ekosistem.

*** Proyeksi Permasalahan:**

- Perubahan penggunaan lahan yang cepat yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan diikuti oleh peningkatan aktivitas pertanian, perkebunan, industri, dan

pertambangan dapat menurunkan daya dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

- Bekas lahan penggalian batubara bila tidak dilakukan reklamasi dapat menjadi masalah lingkungan hidup, karena akan menimbulkan kerusakan fisik lahan dan terjadinya lahan kritis atau dapat menimbulkan erosi pada musim hujan.
- Eksploitasi SDA (selain batubara) secara besar-besaran dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan lingkungan. Di samping itu, penebangan hutan yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku terutama pada sistem tebang habis dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengurangi keragaman hayati.
- Lahan dengan kemiringan di atas 40 persen sangat rawan untuk terjadinya kerusakan lingkungan, terlebih bila dipaksakan untuk kegiatan walaupun hanya terbatas.

*** Proyeksi Keberhasilan:**

- Kondisi geomorfologi yang disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, jika ditata dengan baik, diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di bidang sosial maupun ekonomi.
- Permasalahan lingkungan alam di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi fisiografi, kemiringan, ketinggian lahan, dan jenis tanah walaupun dalam kondisi tertentu dengan teknologi modern dapat diatasi, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan berbagai kegiatan, tetapi tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan maksud menjaga keseimbangan alamnya.
- Semakin menipisnya ketersediaan cadangan bahan galian (batu bara) menuntut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan sektor unggulan yang berbasis kepada sumber daya yang dapat diperbaharui seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

E. Output:

- Potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada sektor pertambangan dan penggalian sangat besar, sehingga ditargetkan dan diperkirakan dapat dimanfaatkan secara hemat dan optimal selama 20-25 tahun.
- Semakin luasnya penggunaan lahan untuk wilayah permukiman pertanian lahan kering, kebun campuran, tegalan, dan perkebunan.

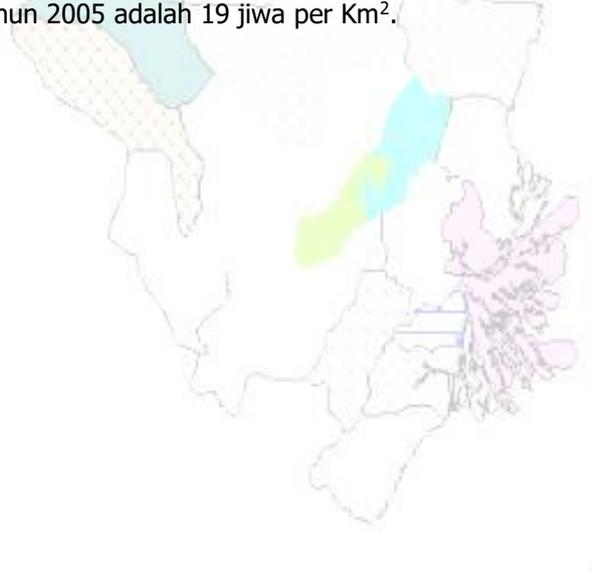
- Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan dapat dipertahankan serta ketersediaan SDA terjamin.
- Meningkatnya aktivitas pertanian, perkebunan, dan penggalian akan berdampak terhadap menurunnya jumlah keanekaragaman hayati, karena beberapa spesies hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan lagi.

2.1.2. Demografi

A. Input:

1. Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun cukup pesat. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,43 persen per tahun. Pada akhir tahun 2005, jumlah penduduk mencapai 531.039 jiwa, dengan proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Penyebaran penduduk relatif tidak merata, yakni terkonsentrasi di Kecamatan Tenggarong (kepadatan sekitar 170 jiwa per Km²) dan Tenggarong Seberang (kepadatan sekitar 111 jiwa per Km²). Wilayah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Tabang, yakni hanya sekitar 1 jiwa per Km². Secara kumulatif, densitas penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai akhir tahun 2005 adalah 19 jiwa per Km².



Tabel 2.1
Prediksi Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin,
Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Penyaluran Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025

Tahun	Total Penduduk	Jumlah		Penduduk Miskin	Angkatan Kerja	Pengangguran	Penyaluran Kerja
		Laki-Laki	Perempuan				
2005	531039,00	281582,00	249457,00	70385,00	51633,00	4407,00	1437,00
2006	547696,47	289436,80	258259,67	70381,33	53833,17	6330,20	1862,70
2007	558787,70	295002,70	263785,00	69128,37	55669,00	6878,26	2894,00
2008	573043,53	302094,53	270949,00	67878,80	57504,83	6575,31	3521,57
2009	586917,88	308804,88	278113,00	66608,83	59522,83	6298,32	3354,69
2010	600792,23	315515,23	285277,00	65351,33	61467,97	7306,14	3635,51
2011	614666,58	322225,58	292441,00	64093,83	63413,10	7089,23	3916,32
2012	628540,93	328935,93	299605,00	62836,33	65358,23	7175,28	3674,83
2013	642415,28	335646,28	306769,00	61578,83	67303,37	7486,11	3731,80
2014	656289,63	342356,63	313933,00	60321,33	69248,50	7744,43	3788,77
2015	670163,98	349066,98	321097,00	59063,83	71193,63	7742,28	3845,74
2016	684038,33	355777,33	328261,00	57806,33	73138,77	8010,04	4983,79
2017	697912,68	362487,68	335425,00	56548,83	75083,90	8209,33	5601,20
2018	711787,03	369198,03	342589,00	55291,33	77029,03	8352,05	5882,01
2019	725661,38	375908,38	349753,00	54033,83	78974,17	8516,32	6162,83
2020	739535,73	382618,73	356917,00	52776,33	80919,30	8733,03	5967,77
2021	753410,08	389329,08	364081,00	51518,83	82864,43	8890,05	5811,90
2022	767284,43	396039,43	371245,00	50261,33	84809,57	9062,88	6029,85
2023	781158,78	402749,78	378409,00	49003,83	86754,70	9249,48	6247,81
2024	795033,13	409460,13	385573,00	47746,33	88699,83	9429,21	6465,77
2025	808907,48	416170,48	392737,00	46488,83	90644,97	9598,46	6683,72
2006	547696,47	289436,80	258259,67	70381,33	53833,17	6330,20	1862,70
2010	600792,23	315515,23	285277,00	65351,33	61467,97	7306,14	3635,51
2015	670163,98	349066,98	321097,00	59063,83	71193,63	7742,28	3845,74
2020	739535,73	382618,73	356917,00	52776,33	80919,30	8733,03	5967,77
2025	808907,48	416170,48	392737,00	46488,83	90644,97	9598,46	6683,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Berbagai Publikasi (Diolah)

2. Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2002 sampai dengan 2005 menunjukkan peningkatan. Dalam 4 tahun terakhir, yakni antara tahun 2002-

2005, tercatat kenaikan angka IPM sebesar 3,5. Berdasarkan pembagian wilayah pembangunan, maka pada tahun 2005, angka IPM tertinggi dijumpai di Wilayah Pembangunan Tengah (meliputi kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Loa Janan, dan Loa Kulu), yaitu rata-rata mencapai 73,77. Posisi kedua, yaitu rata-rata sebesar 71,46 terjadi di Wilayah Pembangunan Pesisir (meliputi kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu). Sedangkan angka IPM terendah ditemukan di Wilayah Pembangunan Hulu (meliputi kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Wis, dan Kota Bangun) 68,67.

Angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 66,2 tahun pada tahun 2002 menjadi 67,5 pada tahun 2005, dan melebihi angka harapan hidup nasional pada tahun yang sama, yaitu 66,2 di tahun. Hal ini memperlihatkan adanya perbaikan tingkat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun. Angka melek huruf yang mendekati seratus persen, yaitu dari 95,7 pada tahun 2002 menjadi 96,4 pada tahun 2005 menunjukkan bahwa kemampuan baca tulis masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik. Untuk rata-rata lama sekolah, terjadi peningkatan dari 7,7 tahun pada tahun 2002 menjadi 8,3 pada tahun 2005. Fakta ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara baru menjangkau tingkat pendidikan menengah. Hasil analisis terhadap komponen daya beli masyarakat memperlihatkan terjadinya kenaikan yang relatif kecil pada indeks konsumsi per kapita, yaitu 69,97 persen pada tahun 2005. Hal ini antara lain dikarenakan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, sedangkan pendapatan masyarakat relatif konstan.

B. Permasalahan:

- Meski berada di atas angka harapan hidup nasional, namun angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan terendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- Pola persebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah sangat timpang sebagaimana terlihat dari perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan.

C. Capaian Keberhasilan:

- Terkendalinya pertumbuhan penduduk sebesar 4,3 persen per tahun pada 2025.
- Angka harapan hidup (*life expectancy*) mencapai 67,5 tahun pada tahun 2005 telah melebihi angka harapan hidup nasional sebesar 66,2 tahun pada tahun yang sama.
- Berdasarkan klasifikasi IPM menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), maka Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2002–2005 termasuk ke dalam "Status Pembangunan Manusia Menengah Atas". Ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan sudah cukup dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
- Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan yang ditandai dengan makin berkembangnya jumlah dan mutu Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat maupun sebagai kelompok potensial yang bergerak di bidang kesehatan.

D. Analisis:

* Proyeksi Peluang:

- Meningkatnya angkatan kerja merupakan peluang bagi tersedianya sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai sektor.
- Meningkatnya kualitas layanan dan partisipasi aktif masyarakat di bidang kesehatan menjadikan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak memiliki peluang dalam mengakses pelayanan kesehatan.

* Proyeksi Ancaman:

- Pertumbuhan penduduk maupun angkatan kerja yang cukup tinggi dan hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun ekonomi.
- Rendahnya kontribusi sektor kesehatan dalam membentuk indeks IPM mengindikasikan bahwa permasalahan kesehatan di semua wilayah pembangunan belum tertangani secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia.

* Proyeksi Permasalahan:

- Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyulitkan pelayanan dasar, baik sosial maupun ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi disparitas pembangunan.

- Pertumbuhan penduduk maupun angkatan kerja yang cukup tinggi jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan berdampak pada permasalahan pembangunan, antara lain bertambahnya jumlah pengangguran serta tingkat kriminalitas.
- Nilai IPM yang telah berada pada kategori menengah atas perlu mendapat perhatian terutama pada komponen-komponen yang memiliki nilai rendah, yaitu komponen harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang masih perlu ditingkatkan.
- Tingginya kebutuhan lahan permukiman setiap tahun seiring dengan penambahan penduduk.

*** Proyeksi Keberhasilan:**

- Angkatan kerja diperkirakan dapat terserap oleh kesempatan kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan perekonomian apabila diupayakan terjadinya keseimbangan kuantitas maupun kualitas di antara permintaan dan penawaran kesempatan kerja.
- Jika mengacu dari klasifikasi IPM menurut UNDP, maka seluruh wilayah pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kondisi yang sama, yaitu berstatus menengah keatas. Namun, bila target pencapaian status ditingkatkan menjadi "Status Tinggi", maka peluang terbesar untuk mencapainya terjadi pada Wilayah Pembangunan Tengah.

E. Output:

Prediksi kondisi demografi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 20 tahun ke depan :

- Persebaran penduduk yang semakin merata diantaranya karena ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dan semakin berkembangnya kawasan pemukiman.
- Tercapainya status tinggi IPM di semua wilayah pembangunan, karena semakin merata dan terjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas terhadap sumber-sumber ekonomi.

2.1.3. Ekonomi dan Keuangan Daerah

A. Input:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku bernilai Rp 20,21 triliun pada tahun 2000, dan meningkat menjadi Rp 33,92 triliun pada tahun 2005. Pada periode yang sama, PDRB tanpa minyak dan gas bumi (non-migas) mengalami peningkatan dari Rp 4,76 triliun menjadi Rp 11,66 triliun. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan harga konstan, maka terjadi peningkatan PDRB dari Rp 23,16 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 24,12 triliun pada tahun 2005.

Secara kumulatif, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas sebesar 3,32 persen per tahun, sedangkan untuk PDRB tanpa migas mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,79 persen per tahun.

Tabel 2.2
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Migas
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas
2005	11.58	4.12
2006	7.72	5.98
2007	8.27	5.54
2008	8.94	5.54
2009	7.29	6.26
2010	6.55	6.64
2011	7.12	6.60
2012	6.87	6.20
2013	6.79	6.38
2014	6.73	6.36
2015	7.00	6.04
2016	7.05	5.92
2017	6.83	6.04
2018	7.26	5.58
2019	7.02	5.71
2020	7.23	5.45
2021	7.16	5.43
2022	7.42	5.13
2023	7.14	5.30
2024	7.61	4.81
2025	7.23	5.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Berbagai Publikasi (Diolah)

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Nilai PDRB per kapita tanpa migas di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2000 hingga tahun 2005 cenderung merambat naik, meskipun nilai PDRB per kapita dengan migas cenderung mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas sepanjang tahun 2000-2005 adalah 2,43 persen per tahun, sedangkan PDRB per kapita dengan migas mengalami perlambatan, yakni -0,75 persen per tahun.

PDRB per kapita dengan migas tahun 2004 mencapai Rp 58,43 juta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 68,87 juta. Sementara itu, pendapatan per kapita pada tahun 2004 sebesar Rp 53,13 juta dan meningkat menjadi Rp 62,62 juta pada tahun 2005.

Pada tahun 2004 PDRB per kapita tanpa migas senilai Rp 17,83 juta dan meningkat menjadi Rp 23,68 juta pada tahun 2005. Sementara itu, pendapatan per kapita pada tahun 2004 bernilai Rp 16,05 juta menjadi Rp 21,32 juta pada tahun 2005.

3. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melibatkan komponen migas selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 relatif tidak banyak mengalami pergeseran. Dua sektor yang sangat dominan dan memegang peranan penting dalam perekonomian Kutai Kartanegara adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan sub sektor pertambangan migas dan sektor pertanian dengan sub sektor kehutanan.

Peran sektor pertambangan dan penggalian sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2005 bila dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 76,20 persen menjadi 76,67 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya peran sub sektor pertambangan non-migas, yakni dari 6,01 persen menjadi 10,42 persen. Namun sebaliknya, untuk sektor pertanian pada tahun 2005 mengalami sedikit penurunan peran, yaitu menjadi 9,37 dari tahun sebelumnya sebesar 9,53 persen.

Sementara struktur ekonomi tanpa migas sedikit mengalami pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga tahun 2004, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian, selanjutnya sektor pertambangan dan penggalian non migas yang menempati urutan teratas dalam pembentukan PDRB tanpa migas. Pada tahun 2005, struktur perekonomian tanpa migas mengalami pergeseran, di mana sektor pertambangan dan penggalian non-migas (seperti batubara, emas, perak dan lain-lain) memberikan kontribusi sebesar 32,14 persen. Sedangkan sektor pertanian tercatat hanya 27,24 persen pada tahun yang sama. Setelah itu diikuti oleh sektor bangunan 14,70 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 10,58 persen, dan sektor industri pengolahan 6,73 persen. Sementara itu, peran sektor-sektor lainnya terhadap total PDRB (sektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa) kurang dari 5 persen.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi meliputi sektor bangunan (14,42 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (8,07 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi (5,95 persen), industri pengolahan

(5,21 persen). Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan relatif rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian (2,90 persen) dan pertanian (1,23 persen).

Dari aspek penggunaan sampai dengan tahun 2005, bagian terbesar dari PDRB Kutai Kartanegara digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 atau dalam enam tahun terakhir, nilai konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan sebesar Rp 1,931,838 juta atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2000. Akan tetapi, pada tahun 2004 dan 2005 perannya mengalami penurunan, yaitu masing-masing menjadi 13,34 persen dan 13,88 persen. Selama tahun 2000-2005, peran konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 13,55 persen per tahun.

Pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001 terus mengalami peningkatan. Peran pengeluaran pemerintah dalam pembentukan PDRB selama tahun 2000-2005 bergerak pada kisaran 5,07-6,19 persen. Peningkatan peran pengeluaran pemerintah terjadi pada tahun 2001 sampai tahun 2003, kemudian sama halnya dengan konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, perannya sedikit menurun pada tahun 2004 dan 2005, di mana masing-masing berperan sebesar 5,57 persen dan 5,07 persen. Secara rata-rata dalam periode 2000-2005 peran konsumsi pemerintah dalam PDRB penggunaan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 5,53 persen per tahun.

Pada tahun 2001, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai Rp 2,829,531 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,79 persen. Total PMTB atau investasi pada tahun 2004 sebesar Rp 3,934,797 juta, sementara tahun 2005 sebesar Rp 4,728,777 juta, atau terjadi peningkatan sebesar 4,97 persen. Peran PMTB selama periode tahun 2000-2005 rata-rata sebesar 14,12 persen per tahun terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama periode 2001-2005, besaran Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kutai Kartanegara cukup fluktuatif, yaitu berkisar antara 2,60-7,59, sehingga selama tahun 2001-2005 rata-rata dibutuhkan 5,07 unit investasi untuk meningkatkan 1 unit PDRB.

Pada periode 2000-2005, total nilai ekspor Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku meningkat sangat tajam,

yakni dari Rp 20,205,968 juta di tahun 2000 menjadi sebesar Rp 33,920,302 juta pada tahun 2005. Adapun total nilai impor Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 sebesar Rp 12,832,050 juta juga meningkat sebesar 3,85 persen dibandingkan tahun 2004 yang masih sebesar Rp 10,793,911 juta. Peran komponen ekspor mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 terhadap PDRB Kutai Kartanegara sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun peran ekspor secara total dalam PDRB selama periode 2000 - 2005 rata-rata sebesar 105,72 persen per tahun, di mana peran ekspor antar negara mencapai 75,16 persen dan ekspor antarpulau mencapai 30,56 persen per tahun. Sementara itu, peran impor rata-rata per tahun sebesar 30,25 persen (antarnegara) dan 10,19 persen (antarpulau), atau dengan kata lain, net ekspor selama 5 tahun terakhir selalu positif (surplus).

Dalam periode 2000-2005, neraca perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya mengalami nilai surplus yang cukup tinggi, dan memiliki siklus yang cenderung meningkat bila dilihat dari sisi besaran. Surplus neraca perdagangan di tahun 2000 sebesar Rp 13,361,477 juta, kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp 22,319,431 juta atau naik dua kali lipat terhadap tahun 2000.

Berdasarkan nilai Location Quotient (LQ) diketahui bahwa selama periode 2000-2004 sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi regional, kemudian disusul oleh sektor pertanian dan sektor bangunan. Dengan demikian, ketiga sektor tersebut memenuhi syarat sebagai sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan sektor yang sama dalam konteks regional yang lebih luas, sehingga bisa menjadi andalan dan berprospek untuk dikembangkan pada masa yang akan datang oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Tabel 2.3
Prediksi Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 Berdasarkan Harga
Konstan Tahun 2000 (Dalam Milliar Rupiah)

Sektor/Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	10.93	10.88	10.80	10.71	10.63	11.32	11.35	11.38	11.41	11.44	11.47
Pertambangan dan Penggalian	77.41	76.42	74.77	74.03	73.29	72.45	71.46	70.47	69.47	68.48	67.49
Industri Pengolahan	0.63	0.65	0.67	0.70	0.76	0.83	0.89	0.96	1.03	1.09	1.16
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26
Bangunan	3.85	4.40	4.66	4.92	5.18	5.44	5.70	5.96	6.22	6.48	6.74
Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.87	4.03	4.10	4.35	4.51	4.67	4.83	4.99	5.15	5.31	5.47
Pengangkutan dan Komunikasi	0.85	0.88	0.91	0.94	0.97	1.00	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.12	1.23	1.29	1.18	1.41	1.64	1.87	2.10	2.33	2.56	2.79
Jasa2	1.29	1.39	1.37	1.57	1.76	1.96	2.15	2.35	2.54	2.74	2.93

Sektor/Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	11.494	11.523	11.552	11.581	11.61	11.639	11.668	11.697	11.726	11.755
Pertambangan dan Penggalian	66.498	65.506	64.514	63.522	62.53	61.538	60.546	59.554	58.562	57.57
Industri Pengolahan	1.224	1.29	1.356	1.422	1.488	1.554	1.62	1.686	1.752	1.818
Listrik, Gas dan Air Bersih	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36	0.38	0.4	0.42	0.44	0.46
Bangunan	7	7.26	7.52	7.78	8.04	8.3	8.56	8.82	9.08	9.34
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.63	5.79	5.95	6.11	6.27	6.43	6.59	6.75	6.91	7.07
Pengangkutan dan Komunikasi	1.18	1.21	1.24	1.27	1.3	1.33	1.36	1.39	1.42	1.45
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.02	3.25	3.48	3.71	3.94	4.17	4.4	4.63	4.86	5.09
Jasa2	3.125	3.32	3.515	3.71	3.905	4.1	4.295	4.49	4.685	4.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Berbagai Publikasi (Diolah)

4. Inflasi Daerah

Perkembangan inflasi sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa menunjukkan perkembangan yang fluktuatif pada setiap periode. Pada tahun 2001, inflasi sektor bangunan menyentuh titik tertinggi, yaitu mencapai 88,99 persen. Memasuki tahun 2002, inflasi pada sektor ini menurun drastis menjadi minus 11,86 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan inflasi pada sektor bangunan bergerak relatif stabil, di mana pada tahun 2005 inflasi sektor bangunan sebesar 4,29 persen. Secara umum, rata-rata inflasi sektor bangunan dalam 5 tahun terakhir sebesar

17,41 persen. Sektor kedua yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi adalah sektor jasa-jasa, di mana inflasi sektor jasa-jasa pada tahun 2001 sebesar 36,80 persen kemudian turun menjadi 2,03 persen pada tahun 2002. Laju inflasi sektor pertanian pada tahun 2003 turun menjadi 5,68 persen dan kembali meningkat menjadi 7,79 persen pada tahun 2004 dan 12,61 persen pada tahun 2005. Rata-rata inflasi sektor jasa-jasa selama 5 tahun terakhir sebesar 13,02 persen per tahun. Sektor ketiga yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi adalah sektor jasa-jasa, di mana inflasi pada tahun 2001 untuk sektor pertanian sebesar 13,74 persen kemudian meningkat menjadi 17,52 persen pada tahun 2002. Laju inflasi sektor pertanian pada tahun 2003 turun menjadi 2,17 persen dan kembali meningkat menjadi 5,72 persen pada tahun 2004 dan 13,91 persen pada tahun 2005. Rata-rata inflasi sektor pertanian selama 5 tahun terakhir sebesar 10,61 persen per tahun. Sementara inflasi sektor-sektor lain berkisar antara 5 sampai 7 persen per tahun.

Tabel 2.4
Prediksi Laju Inflasi Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Dalam Persen)

Tahun	Inflasi Dengan Migas	Inflasi Tanpa Migas
2005	14.48	20.39
2006	9.56	9.13
2007	6.25	9.64
2008	5.50	8.54
2009	7.96	7.85
2010	5.59	7.56
2011	4.26	7.06
2012	6.59	7.64
2013	5.22	6.58
2014	5.07	6.60
2015	6.08	7.03
2016	5.86	6.06
2017	4.81	5.96
2018	7.18	5.91
2019	4.92	5.48
2020	7.22	4.22
2021	5.44	5.23
2022	8.77	4.81
2023	4.59	4.05
2024	6.45	4.47
2025	4.90	4.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Berbagai Publikasi (Diolah)

5. Keuangan Daerah

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) Dana Perimbangan; (4) Pinjaman Pemerintah Daerah; dan (5) Penerimaan Lainnya Yang Sah. Perkembangan penerimaan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun terakhir senantiasa mengalami peningkatan.

Sumber pendapatan dari Dana Perimbangan merupakan pos terbesar dalam sumber pendapatan daerah dan menunjukkan tren perkembangan yang positif. Pada tahun 2000, Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 177,62 milyar, kemudian meningkat tajam menjadi Rp 1,49 triliun pada tahun 2001. Pada tahun 2002, besarnya Dana Perimbangan menjadi Rp 1,64 triliun dan terus meningkat hingga menembus besaran Rp 1,93 triliun pada tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2005, besarnya Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp 3,09 triliun. Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2001-2005 mengalami perkembangan yang fluktuatif, di mana pada tahun 2001 besarnya PAD sebesar Rp 16,32 milyar kemudian menurun menjadi Rp 15,17 milyar pada tahun 2002. Pada tahun 2003, PAD Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 34,06 milyar dan kembali menurun menjadi Rp 26,06 milyar pada tahun 2005. Komponen pendapatan daerah dari pos Dana Perimbangan selama kurun waktu 2001-2005 menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun.

Sama halnya dengan PAD, sumber penerimaan yang berasal dari pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga menunjukkan trend perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2001, besarnya penerimaan dari pos ini sebesar Rp 471,7 juta dan meningkat menjadi Rp 1,89 milyar pada tahun 2001. Pada tahun 2002, penerimaan sebesar Rp 6,03 milyar, dan menurun menjadi Rp 3,99 milyar pada tahun 2003. Penerimaan tertinggi dari sektor ini terjadi pada tahun 2004, yaitu mencapai Rp. 31,16 milyar. Pada tahun 2005, terjadi sedikit penurunan, di mana penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 28,55 milyar.

6. Investasi Daerah

Perkembangan investasi selama pelaksanaan Otonomi Daerah antara tahun 2001-2004 tercatat sebanyak 14 proyek PMDN dan 7 proyek PMA dengan total nilai investasi berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal sampai dengan bulan Juni 2004 sebesar Rp 1.689.161.267.500. Dengan perincian total investasi untuk PMDN sebesar Rp.1.383.903.267.500 dan total nilai investasi

untuk PMA sebesar Rp 305.258.000.000 (US\$ 30,525,800). Adapun bidang investasi yang paling diminati meliputi perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, industri kayu, konstruksi bidang tambang dan gas bumi, bidang tenaga listrik, bidang pertambangan batubara, pembekuan udang, bidang perdagangan, dan bidang peternakan. Sektor investasi yang menonjol selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah industri kayu, tenaga listrik, gas dan air minum, pertambangan batubara, dan bidang perdagangan.

B. Permasalahan:

- Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui, yakni sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor pertambangan migas.
- Ketergantungan terhadap alokasi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat masih tinggi.
- Peran lembaga dan instansi penyumbang dan pengumpul PAD belum maksimal.
- Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang sistem alokasi anggaran pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.
- Pertumbuhan sektor pertanian selama periode 2001-2005 belum mampu sepenuhnya mencapai pertumbuhan yang stabil atau belum terlepas dari "perangkap spiral pertumbuhan rendah".

C. Capaian Keberhasilan:

- Secara kumulatif, dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas bertumbuh sebesar 3,32 persen per tahun, sedangkan untuk PDRB tanpa migas mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,79 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas sepanjang tahun 2000-2005 adalah 2,43 persen per tahun.
- Peran PMTB selama periode tahun 2000-2005 rata-rata sebesar 14,12 persen per tahun terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dalam periode 2000-2005, neraca perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya mengalami nilai surplus yang cukup tinggi. Surplus neraca perdagangan di tahun 2000 sebesar Rp 13,361,477 juta, kemudian pada tahun 2005

sebesar Rp 22,319,431 juta atau naik dua kali lipat terhadap tahun 2000.

D. Analisis:

*** Proyeksi Peluang:**

- Pengelolaan sektor pertambangan dan penggalian perlu diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok pembangunan, seperti pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan, serta disparitas pendapatan. Namun, tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Kemampuan penyediaan dukungan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang memadai merupakan peluang untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian atau perkebunan.
- Sektor petanian yang menonjol dan dapat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian wilayah adalah sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor kehutanan. Pengembangan sektor pertanian atau perkebunan dapat dilakukan dengan konsep agroindustri atau agrowisata melalui tanaman bernilai tambah tinggi (high value crop).
- Besarnya peluang untuk mendorong investasi di sektor penyediaan energi mengingat semakin tingginya permintaan energi dan adanya ketersediaan sumber daya serta infrastruktur.
- Sebagai pusat kegiatan lokal, Kota Tenggara memiliki peran strategis sebagai kota penyebar kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

*** Proyeksi Ancaman:**

- Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat mendorong terjadinya disparitas pendapatan, baik antar individu dan kelompok masyarakat maupun antarwilayah, apalagi dengan tingkat inflasi yang meskipun mengalami penurunan, namun masih relatif tinggi.
- Berlakunya pasar bebas Asia-Pasifik tahun 2010 dapat memberikan dampak negatif terhadap sektor pertanian, mengingat skala usaha yang belum ekonomis dan lemahnya investasi di sektor ini.

*** Proyeksi Permasalahan:**

- Proses alih fungsi lahan pasca tambang menjadi lahan pertanian atau perkebunan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama.
- Penurunan pendapatan riil dan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat inflasi apabila tidak mampu ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
- Masih rendahnya peran swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Hal ini terkait dengan masalah perijinan dan belum optimalnya promosi potensi daerah.
- Pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertambangan dan galian ke sektor pertanian akan berimplikasi pada turunnya penerimaan daerah melalui komponen bagi hasil bukan pajak sumber daya alam.

*** Proyeksi Keberhasilan:**

- Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yang diprediksikan tumbuh rata-rata 7,27 persen per tahun diharapkan terus mengalami peningkatan, diiringi pula oleh kenaikan PDRB per kapita dan pendapatan per kapita penduduk sebagai salah satu indikator kemakmuran masyarakat.
- Ketersediaan SDA yang relatif masih melimpah, apabila dikelola dengan baik merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah dan aktivitas perekonomian maupun perbaikan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
- Ketersediaan lahan pertanian maupun perkebunan serta konsistensi kebijakan pemerintah akan menjamin proses pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, dari ketergantungannya terhadap sektor pertambangan dan penggalan ke sektor pertanian atau perkebunan.
- Semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur, sarana-prasarana, dan pemenuhan fasilitas pertanian atau perkebunan (seperti rice processing unit) akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan.
- Ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjamin fluktuasi harga-harga secara umum relatif stabil Hal ini selanjutnya akan berdampak terjaganya laju inflasi daerah.

- Terselenggaranya sistem dan mekanisme penganggaran berbasis kinerja untuk menunjang akuntabilitas serta peningkatan pendapatan daerah.
- Peningkatan efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

E. Output:

- Terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian secara perlahan dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian maupun perkebunan, mengingat keterbatasan jumlah cadangan di sektor pertambangan dan penggalian (unrenewable resources) serta eskalasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan dan penggalian.
- Terwujudnya kawasan pertanian atau perkebunan berbasis agroindustri dan agrowisata, sekaligus kawasan penyangga stok pangan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangan pertanian melalui revitalisasi pertanian diharapkan akan membawa sektor ini memiliki daya saing tinggi, bernilai tambah dan berkelanjutan, serta mampu mendorong terwujudnya kemandirian pangan (ketahanan pangan).
- Terarahnya investasi pada faktor-faktor produksi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis daerah.
- Tingginya minat investasi di sektor energi dapat menjamin ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.4. Sosial Budaya dan Politik

A. Input:

1. Kesehatan

Hingga tahun 2005, jumlah prasarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 unit, yang terletak di Ibu kota Kabupaten terdapat 1 Unit, dan di Kecamatan Samboja 1 unit sebagai pusat pelayanan kesehatan wilayah pesisir. Sedangkan 1 unit lainnya direncanakan akan dibangun di Kecamatan Kota Bangun sebagai pusat pelayanan kesehatan untuk wilayah hulu. Di samping itu, sarana kesehatan (Puskesmas) telah tersedia disetiap kecamatan dengan jumlah seluruhnya mencapai 27 unit dan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 127 unit. Sarana pendukung lainnya adalah Polindes sebanyak 54 unit dan Balai Pengobatan

Swasta sebanyak 30 unit. Sementara itu, terdapat fasilitas rumah dokter sebanyak 27 unit, rumah dokter gigi 8 unit, dan rumah paramedis sebanyak 58 unit.

Jumlah tenaga kesehatan yang tersebar pada unit kerja Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu, Polindes, serta Dinas Kesehatan seluruhnya berjumlah 1.087 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat tenaga Medis (dokter umum/ spesialis) sebanyak 134 orang, Perawat/Bidan (D3 dan S1) sebanyak 829 orang, Tenaga Farmasi (Apoteker/Asisten Apoteker) sebanyak 24 orang, ahli Gizi sebanyak 21 orang, Tenaga Medis (Analis, Penata Rontgen, Anestesi, Fisioterapi) sebanyak 19 orang, ahli Sanitasi sebanyak 35 orang, dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM, MPH) sebanyak 32 orang.

Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2004-2006 secara kuantitas menunjukkan kenaikan yang cukup berarti, yaitu dari Rp 30,84 milyar pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 37,37 milyar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 45,77 milyar. Secara total, biaya kesehatan per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2004 sebesar Rp 56.291, tahun 2005 Rp 68.279, dan tahun 2006 mencapai Rp 85.377. Jumlah ini masih berada di bawah standar anggaran di tingkat internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar Rp 120.500 per kapita per tahun, baik untuk kebutuhan biaya minimal maupun normatif.

2. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2002 mengalami penurunan, yaitu dari 4.867 orang pada tahun 2001 menjadi 3.652 orang. Pada tahun 2003, jumlah tersebut meningkat menjadi 5.418 orang dan tahun 2004 terus meningkat menjadi 8.066 orang. Namun, pada akhir tahun 2005 jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni menjadi hanya 4.407 orang.

3. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (umur di atas 15 tahun) selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 21.26 persen, yaitu dari 296.429 orang tahun 2001 menjadi 359.460 orang tahun 2005. Komposisi penduduk usia kerja pada tahun 2005 sebagai berikut: (1) angkatan kerja sebanyak 309.028 orang (bekerja 90.39 persen, mencari pekerjaan 9.65 persen); dan (2) bukan angkatan kerja sebanyak 50.432 orang (sekolah 44.33 persen, mengurus rumah tangga 11.55 persen, lainnya 44.14 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2005 sebesar 57,67

dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 8,15 persen, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 91,85 persen. Angka TPT tahun 2005 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 5,66 persen atau TKK sebesar 94,34 persen.

Penduduk yang mencari kerja pada tahun 2005 yang tercatat pada Dinas Tenaga kerja berjumlah 5.176 orang, terdiri dari 2.736 orang berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), 1.003 orang berpendidikan Diploma IV/Sarjana, 622 orang berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), dan sisanya berpendidikan Diploma I/II/III, serta Tidak Tamat/Tamat Sekolah Dasar (SD).

4. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), berdasarkan tingkat kelulusan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN), dan tingkat melek aksara. Pada tahun 2004, APS untuk penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai 97,73 persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 92,12 persen, dan APS penduduk usia 16-18 tahun berkisar 61,32 persen. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah, baik karena belum atau tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2005 sebesar 104,92 persen, yang berarti bahwa jumlah penduduk yang bersekolah dasar melebihi jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun). Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan APK tahun 2004 sebesar 114,43 persen. Demikian halnya APK untuk SLTP dan SLTA pada tahun 2005 yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 86,68 persen dan 55,82 persen, bila dibandingkan tahun 2004 yang masing-masing mencapai 92,18 persen dan 67,78 persen. Terlihat bahwa semakin tinggi usia anak, maka semakin kecil pula angka partisipasi sekolahnya. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2005 sebesar 89,23 persen, APM SLTP sebesar 59,94 persen, dan APM SLTA sebesar 35,96 persen.

Tingkat kelulusan siswa untuk semua jenjang pendidikan dalam UAN meningkat dari 97,66 persen pada tahun ajaran 2001/2002 menjadi 99,70 persen pada tahun ajaran 2004/2005. Tingkat melek aksara juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk umur 10-44 tahun yang buta

huruf mengalami penurunan dari 2,04 persen pada tahun 2001 menjadi 1,09 persen pada tahun 2005.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2006 mencapai 665 buah yang terdiri dari 466 SD, 122 SLTP, dan 77 SLTA. Lebih lanjut, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat perguruan tinggi swasta bernama Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang berada di kota Tenggarong, kemudian Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong. Selain itu, juga sedang dibangun Politeknik Sumber Daya Kalimantan yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa.

5. Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain tingkat kemiskinan, jumlah pasangan usia subur, dan jumlah panti sosial. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2005 diketahui sebanyak 19.231 KK atau 70.358 jiwa. Berarti terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 5.824 KK atau 29.962 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin pada tahun 2003 sebanyak 25.055 KK atau 100.220 jiwa. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2005 berkisar 14,14 persen, dan 20,56 persen di tahun 2003. Jumlah keluarga atau penduduk miskin pada tahun 2005 tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dengan proporsi tertinggi berada di Kecamatan Samboja (2.513 jiwa) dan Kecamatan Tenggarong Seberang (1.944 jiwa).

Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif selama tahun 2002-2005 mengalami kenaikan sebesar 6,89 persen dari 9.517 orang pada tahun 2002 menjadi 10.173 orang pada tahun 2005. Jumlah pekerja sosial mengalami peningkatan sebesar 12,38 persen selama tahun 2001-2005 yang tersebar secara merata di setiap kecamatan. Pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 13 panti asuh dengan jumlah anak asuh sebanyak 800 orang (484 laki-laki, 316 perempuan).

6. Kematian Bayi

Dari cakupan persalinan, kasus kematian bayi adalah 20 bayi pada tahun 2002, 18 bayi pada tahun 2003, 32 bayi pada tahun 2004, dan 12 bayi pada tahun 2005. Sedangkan status gizi sepanjang tahun 2000-2003 terjadi kecenderungan peningkatan status gizi baik dan penurunan status gizi kurang pada balita. Tetapi pada tahun 2004 terjadi penurunan status gizi baik dan peningkatan yang tajam dari status gizi buruk dan gizi kurang

(KEP Total), yaitu dari 14,3 persen pada tahun 2003 menjadi 22,6 persen pada tahun 2004. Selanjutnya dari 6 kasus gizi buruk yang dijumpai di tahun 2005, 2 kasus diantaranya ditemukan di wilayah Kecamatan Muara Kaman, 1 kasus di wilayah Kecamatan Kenohan dan 1 kasus di wilayah Kecamatan Tenggarong.

7. Lapangan Kerja

Sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2005 mencapai 82.070 orang (44,34 persen). Kemudian sektor jasa dan perdagangan masing-masing menempati urutan ke dua dan ketiga (13,60 persen dan 11,87 persen). Sementara sektor listrik, gas, dan air merupakan lapangan usaha terendah, yaitu hanya berkisar 0,25 persen.

8. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Kasus kejahatan selama periode tahun 2001-2005 mengalami kenaikan sebesar 54,66 persen. Kasus tindak kejahatan pada tahun 2005 didominasi oleh pencurian sebanyak 217 kasus, penggelapan sebanyak 39 kasus, penipuan sebanyak 40 kasus. Pada tahun 2005, dari 614 kasus yang masuk baru terselesaikan sebanyak 338 kasus atau sekitar 55,04 persen. Sedangkan selama periode 2001-2005 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas sebanyak 75,71 persen. Pada tahun 2005, kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian sebesar Rp 553,3 milyar dengan luka ringan sebanyak 17 kasus, luka berat sebanyak 29 kasus, dan meninggal sebanyak 80 kasus.

9. Agama

Ketersediaan sarana ibadah, pada tahun 2005 mencapai 560 buah yang terdiri dari Masjid sebanyak 443 buah, Gereja Katholik 27 buah, Gereja Protestan 86 buah, Pura 4 buah, dan tidak dijumpai adanya Vihara.

10. Politik

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 terdapat 24 partai politik yang memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75 persen, dan pada pemilihan Presiden tahun 2005 sebesar 76 persen.

11. Generasi Muda

Pembinaan generasi muda di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui kegiatan Karang Taruna dan organisasi kepemudaan lainnya. Pada tahun 2005, Jumlah Karang Taruna sebanyak 216 unit (tumbuh 62 unit, berkembang 153 unit, maju 1 unit) yang tersebar relatif merata di semua wilayah kecamatan.

12. Kesenian dan Kebudayaan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi kesenian Suku Dayak yang beragam, seperti musik, tari, drama, seni pahat dan patung, arsitektur, kriya, serta sastra. Seni musik khas suku Kutai adalah musik Tingkilan yang memiliki kesamaan dengan kesenian rumpun Melayu, dan disertai pula dengan nyanyian yang disebut *betingkilan*. Selain Tingkilan, jenis musik lain adalah Hadrah yang dibawakan sambil menabuh *terbang* tersebut disertai nyanyian dalam bahasa Arab yang diambil dari kitab *Barjanji*. Kesenian ini umumnya ditampilkan untuk mengarak pengantin pria menuju ke rumah mempelai wanita, selain itu juga sering ditampilkan pada perayaan hari-hari besar Islam. Seni drama tradisional masyarakat Kutai disebut Mamanda, yang merupakan salah satu seni pertunjukan yang populer di Kutai di masa lalu. Kesenian ini selalu dipertunjukkan pada setiap perayaan nasional, pada acara perkawinan, khitanan, dan sebagainya. Dalam hal seni tari, masyarakat Kutai memiliki banyak jenis tarian tradisional yang terkenal, diantaranya Tari Kancet Pepatai (Tari Perang), Tari Gantar, Tari Kancet Ledo, Tari Kancet Lasan, Tari Leleng, Trai Hudoq, Tari Hudoq Kita', Tari Serumpai, Tari Belian Bawo, Tari Kuyang, Tari Pecuk Kina, Tari Datun, Tari Ngerangkau, dan Tari Baragak Bagantar. Dalam seni patung, Suku Dayak memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang serta bentuk-bentuk yang mereka percaya sebagai roh dari dewa-dewa. Rumah tradisional Suku Dayak dikenal dengan sebutan Lamin, dan biasanya didirikan menghadap ke arah sungai. Dengan bentuk dasar bangunan berupa empat persegi panjang, atap berbentuk pelana, dan merupakan rumah panggung. Di halaman sekitar Lamin terdapat patung-patung kayu berukuran besar yang merupakan patung persembahan nenek moyang (blang). Barang-barang seni kriya tradisional antara lain; mandau, perisai (kelembit), kain serat (ulap doyo), tas anyaman rotan (anjat), keranjang gendong (bening aban), sumpitan dan topi besar (seraung).

13. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tiga jenis wisata, yakni wisata alam, wisata budaya, dan wisata pendidikan. Terdapat 7

(tujuh) obyek wisata alam meliputi Bukit Bangkirai di Samboja, Pantai Tanah Merah di Samboja, Danau Semayang di Kota Bangun, Danau Murung di Kota Bangun, Waduk Panji Sukarame di Tenggarong, Pulau Kumala di Tenggarong, dan Taman Rekreasi Tepian Mahakam Jembatan Kartanegara di Tenggarong. Enam (6) obyek wisata budaya meliputi Museum Mulawarman di Tenggarong (peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara), Kedaton Kutai Kartanegara di Tenggarong (istana baru Sultan Kutai Kartanegara), Desa Pondok Labu di Tenggarong (kehidupan suku Dayak), Desa Lekaq Kidau di Sebulu Lamin, Suku Dayak di Tabang (kehidupan suku Dayak), dan Desa Brubus di Muara Kaman (situs kerajaan tertua di Indonesia). Sedangkan obyek wisata pendidikan meliputi Planetarium Jagad Raya di Tenggarong, Museum Kayu di Tenggarong, dan Museum Perjuangan Merah Putih di Sanga-Sanga.

14. Komunitas Adat Terpencil

Sampai dengan tahun 2005, terdapat 918 KK Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan 325 KK sudah diberdayakan, 60 KK sedang diberdayakan, dan 533 belum diberdayakan. KAT di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kembang Janggut, Loa Kulu, dan Tabang.

B. Permasalahan:

- Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan yang belum memadai. Di samping itu, keadaan geografis dan topografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dan terpencil menyulitkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggerakan serta pengawasan program.
- Persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung belum merata, di mana jumlah tenaga kesehatan lebih banyak berada di daerah perkotaan.
- Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum masih relatif rendah, yaitu setara pendidikan SLTP Kelas 3, terutama di wilayah perdesaan.
- Belum semua kepala keluarga KAT diberdayakan.
- Tingginya pertumbuhan kasus kejahatan selama lima tahun terakhir dapat berpotensi menimbulkan pengaruh negatif terhadap proses pembangunan.

Tabel 2.5

**Prediksi Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertanian
Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2005-2025 (Dalam Persen)**

Tahun	Sektor Pertanian	Sektor Pariwisata
2005	10.930	0.029
2006	10.880	0.034
2007	10.795	0.051
2008	10.710	0.056
2009	10.625	0.067
2010	11.320	0.078
2011	11.349	0.089
2012	11.378	0.100
2013	11.407	0.111
2014	11.436	0.122
2015	11.465	0.133
2016	11.494	0.144
2017	11.523	0.155
2018	11.552	0.166
2019	11.581	0.177
2020	11.610	0.188
2021	11.639	0.199
2022	11.668	0.210
2023	11.697	0.220
2024	11.726	0.231
2025	11.755	0.242
Rata-rata	11.38	0.14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, Berbagai Publikasi (Diolah)

C. Capaian Keberhasilan:

- Bergulirnya program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) sampai tahun 2006.
- Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat secara merata di berbagai jenjang pelayanan.
- Kerukunan beragama di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik yang ditunjukkan dengan tidak adanya konflik antarpemeluk agama.
- Kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum nasional, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, langsung, umum, jujur, dan adil mencerminkan kedewasaan berpolitik warga.

- Terpilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tempat pencaangan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Ini sekaligus menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melindungi anak-anak, baik secara fisik maupun mental, demi meningkatnya sumber daya manusia.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program pembangunan yang disebut Gerbang Dayaku melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa tingkat SD hingga SLTA, baik negeri maupun swasta. Dengan program tersebut ditargetkan pada tahun 2012 anak-anak di bawah usia 18 tahun akan sepenuhnya memperoleh wajib belajar pendidikan dasar.
- Indeks Gini Ratio Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 0,31 (Susenas, 2005) yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan (distribusi pengeluaran) di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup merata. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kategori rendah.
- Peningkatan status kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian balita, menurunnya angka kematian ibu, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita.
- Salah satu keberhasilan program ketenagakerjaan adalah semakin meratanya distribusi tenaga kerja jika dilihat berdasarkan jenis kelamin.

D. Analisis:

*** Proyeksi Peluang:**

- Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata (wisata alam dan budaya) dan dapat dijadikan sebagai entry point bagi pengembangan ekonomi.
- Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pewaris kerajaan tertua di Indonesia merupakan anugerah dan kebanggaan sejarah bagi masyarakat.
- Terwujudnya kultur masyarakat madani di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu masyarakat yang mengedepankan penegakan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan

hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.

- Meningkatnya kesempatan/peluang atau penciptaan lapangan kerja oleh masyarakat sebagai dampak dari berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan tepat guna yang diiringi oleh terwujudnya kemandirian serta jiwa kewirausahaan penduduk.

* **Proyeksi Ancaman:**

- Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah cenderung akan menimbulkan terkonsentrasinya pekerja pada status pekerjaan yang berada pada tingkat rendah dan dapat menyebabkan terhambatnya peningkatan pendapatan yang berdampak kepada rendahnya daya saing konsumsi riil penduduk.
- Kesenjangan upah sektoral yang tinggi dan kurang menguntungkan dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan penduduk. Konsekuensi kurang terkendalinya upah sektoral mengakibatkan meningkatnya kecenderungan penduduk terhadap suatu sektor tertentu yang dapat memberikan kompensasi pendapatan yang lebih baik dan menguntungkan, seperti sektor industri, perdagangan, dan jasa.
- Adanya kesenjangan pembangunan antardaerah dan terjadinya ketidakstabilan politik di tingkat nasional dapat menyebabkan timbulnya gangguan instabilitas politik di tingkat lokal.
- Meningkatnya arus globalisasi informasi, modal, dan tenaga kerja dapat mengancam eksistensi budaya lokal yang berkembang.

* **Proyeksi Permasalahan:**

- Pemberdayaan KAT merupakan masalah penting untuk meningkatkan taraf hidup komunitas adat terpencil dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- Tidak mudah merubah budaya pertanian menjadi budaya pertambangan. Hal ini disebabkan dalam 20 tahun ke depan, sektor pertanian mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yang disebabkan oleh semakin meningkatnya perubahan lahan pertanian menjadi lahan pertambangan

* **Proyeksi Keberhasilan:**

- Peningkatan status gizi pada balita dan semakin rendahnya angka kematian bayi.

- Meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian balita, menurunnya angka kematian ibu, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita.
- Meningkatnya APS, tingkat kelulusan dalam UAN, dan tingkat melek aksara.
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing.
- Meningkatnya kerukunan antarkelompok dan pemeluk agama.

E. Output:

Prediksi kondisi sosial budaya dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah

- Peningkatan status gizi pada balita dan semakin rendahnya angka kematian bayi.
- Meningkatnya jumlah angkatan kerja.
- Menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian, karena berkurangnya lahan untuk pertanian.
- Meningkatnya jumlah wisatawan akan berdampak terhadap terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat.
- Semakin berkembangnya demokrasi dalam politik lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Meningkatnya permasalahan ketertiban sosial yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya tindak kejahatan, pencurian, dan pemalsuan.

2.1.5. Prasarana dan Sarana

A. Input:

1. Sarana Jalan dan Jembatan

Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2004 mencapai 1.188,31 Km yang merupakan jalan kabupaten. Dari jumlah tersebut jalan yang masih dalam kategori baik sekitar 118,25 Km, kategori sedang 160,00 Km, rusak 331,91 Km, dan rusak berat 397,11 Km. Dari 1.188,31 Km panjang jalan tersebut, 100,92 Km merupakan jalan beton, 433,00 Km permukaan aspal, 240,05 Km permukaan kerikil, dan sisanya merupakan jalan berbatu dan tanah.

Jembatan Kutai Kartanegara telah membuka transportasi antara Tenggarong dengan Tenggarong Seberang dan Samarinda dengan jarak kurang lebih 25 Km. Jembatan Martadipura dengan panjang 395 meter dan lebar 6 meter yang terletak di Desa Liang Kota Bangun, telah membuka isolasi di daerah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara yang menghubungkan jalur darat antara Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, dan Kenohan.

Lalu lintas dari dan ke desa/kelurahan di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 3 pilihan yang mungkin dapat dipergunakan, yaitu lalu lintas darat, air, serta darat dan air. Pada tahun 2005 tercatat 197 desa/kelurahan atau 89,55 persen yang telah dapat dilalui dengan lalu lintas darat, dan selebihnya sejumlah 23 desa (10,45 persen) hanya bisa dijangkau dengan lalu lintas air. Keadaan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2001, di mana pada tahun tersebut masih tercatat sekitar 32,67 persen desa yang hanya dapat ditempuh dengan lalu lintas air. Pada tahun 2005, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 lapangan terbang perintis yang hanya dapat didarati oleh pesawat terbang jenis Cassa dan Twin Otter dengan panjang lapang terbang bervariasi, mulai dari 450 m sampai dengan 1.200 m.

2. Pos dan Telekomunikasi

Dalam menyongsong era globalisasi sekarang ini, sektor pos dan telekomunikasi sangat diperlukan dalam memperlancar berita, informasi, dan data. Jumlah pengiriman surat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2004 berkisar 171.169 surat. Komposisi surat yang dikirim menurut sifatnya masing-masing surat biasa 74.136, surat kilat 67.302, surat kilat khusus 24.111, dan surat tercatat 5.620. Selama tahun 2005, sarana telekomunikasi untuk kepentingan umum dilayani oleh 107 wartel, 9 telepon umum kartu, dan 1 warnet.

3. Lembaga Keuangan

Pada tahun 2005 terdapat sebanyak 6 bank nasional yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu BRI, BNI 1946, Lippo Bank, Bank Mandiri, Bank Perserikatan, Bank Danamon dan Bank Pemerintah Daerah (BPD).

4. Koperasi

Pada tahun 2005, jumlah Koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 394 unit, sedangkan jumlah masyarakat yang masuk menjadi anggota koperasi sebanyak 42.318 orang. Bila dirinci menurut jenisnya, dari 394 unit koperasi tersebut terdiri dari koperasi fungsional 4 unit dengan anggota sebanyak 1.700 orang, koperasi buruh/karyawan 22 unit dengan jumlah anggota

2.109 orang, koperasi serba usaha 62 unit dengan anggota 6.251 orang, koperasi wanita 3 unit dengan jumlah anggota 318 orang, koperasi pegawai negeri 47 unit dengan jumlah anggota 12.906 orang, dan koperasi wanita desa 2 unit dengan jumlah anggota 211 orang.

5. Listrik dan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada tahun 2005, total produksi listrik sebesar 91.518.912 KVA dengan daya terpasang sebesar 41.318.000 KVA, dan jumlah tenaga listrik yang terjual sebesar 82.717.759 KVA. Jumlah pelanggan yang dapat dilayani sebanyak 37.737 pelanggan, yang terdiri dari rumah tangga sebanyak 34.767 pelanggan, usaha industri sebanyak 12 pelanggan, dan umum sebanyak 37.637 pelanggan.

Pelayanan air bersih dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam dan air tanah. Kapasitas air minum pada tahun 2005 sebanyak 11.807.549 m³. Jumlah ini diperuntukan bagi 28.054 sambungan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 141.724 jiwa.

B. Permasalahan:

- Sarana fisik jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di wilayah perdesaan dan kualitasnya masih belum memadai.
- Pelayanan listrik dan air bersih belum menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di daerah perdesaan. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk menggunakan sumber daya air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

C. Capaian Keberhasilan:

- Berkembangnya jumlah koperasi dan keanggotaan koperasi. Hal ini mengindikasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

D. Analisis:

*** Proyeksi Peluang:**

- Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang berkembang memiliki potensi SDA yang melimpah. SDA yang ada dapat dimanfaatkan untuk memproduksi energi listrik, sehingga keterbatasan pasokan listrik dari PLN dapat teratasi dengan baik.
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) yang cukup besar selama ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan barang publik lokal secara optimal.

* **Proyeksi Ancaman:**

- Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, pekerjaan, dan fasilitas layanan publik lainnya.
- Meningkatnya ancaman terhadap kualitas dan kuantitas air tanah yang disebabkan perubahan fungsi hutan dan terjadinya pencemaran air permukaan, karena aktivitas pertambangan.

* **Proyeksi Permasalahan:**

- Sulitnya mengembangkan prasarana perhubungan dan sistem transportasi yang disebabkan oleh kondisi geografis dan karakteristik fisik wilayah.
- Keterbatasan pasokan listrik oleh PLN dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan industri dan rumah tangga.
- Keterbatasan pasokan air bersih oleh PDAM yang belum mampu melayani semua kecamatan dan desa.

* **Proyeksi Keberhasilan:**

- Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda darat, sungai, dan udara yang berbasis pada efisiensi, efektif dan berkeadilan.
- Terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan bagi rumah tangga dan dunia usaha.
- Terpenuhinya pasokan air bersih yang berkualitas untuk semua masyarakat.
- Tersedianya prasarana dan sarana publik yang handal di sektor transportasi, telekomunikasi, transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan dan energi.
- Tercukupinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Output:

Prediksi kondisi sarana dan prasarana dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

- Sarana transportasi merupakan faktor yang sangat penting sebagai pendukung kegiatan ekonomi, pengembangan sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.
- Semakin tinggi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, rencana area pertanian, dan rencana area pertambangan.
- Semakin meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi menuntut pembangunan jaringan infrastruktur komunikasi yang semakin meningkat.
- Semakin meningkatnya permintaan energi listrik dan air bersih yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi.
- Semakin meningkatnya kebutuhan perumahan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk.

2.1.6. Pemerintahan

A. Input:

1. Aparatur Pemerintah

Hingga tahun 2005, jumlah aparat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 10.491 pegawai. Dari jumlah tersebut, 323 orang atau 3,08 persen memiliki kualifikasi pendidikan lulus SD, sedangkan sebanyak 275 orang atau 2,62 persen adalah lulus SLTP, dan pegawai yang lulus SLTA berjumlah 3915 orang atau 37,32 persen. Kemudian pegawai yang lulus Diploma I sebanyak 459 orang atau 4,38 persen, sedangkan pegawai yang lulus Diploma II sebanyak 1959 orang atau 18,67 persen, dan 1.033 orang atau 9,85 persen pegawai memiliki kualifikasi lulus Diploma III. Pegawai yang lulus sarjana berjumlah 2.228 orang atau 21,24 persen dan lulus pascasarjana sebanyak 227 orang atau 2,16 persen.

Dilihat dari jenis kepegawaian, komposisi aparat/pegawai diketahui terdiri dari Kepegawaian Fungsional Umum sebanyak 4.847 pegawai atau 46,20 persen, Kepegawaian Fungsional Khusus, yakni guru sebanyak 4.824 orang atau 45,98 persen, sedangkan Pegawai Fungsional Khusus Kesehatan sebanyak 820 orang atau 7,82 persen. Dilihat dari distribusi kepangkatan, terdapat 289 orang pegawai atau 2,75 yang memiliki status Golongan Pangkat I,

kemudian sebanyak 3.348 pegawai atau 31,92 persen memiliki Golongan Pangkat II. Sebanyak 6.092 pegawai atau 58,07 persen memiliki golongan pangkat III dan sisanya sebanyak 762 pegawai atau 7,26 persen memiliki golongan pangkat IV. Kemudian terkait dengan eselonisasi jabatan, sebanyak 8.869 pegawai atau 84,54 persen tidak memiliki jabatan eselon dan sebanyak 1.622 pegawai atau 15,46 persen memiliki jabatan eselon.

2. Kelembagaan

Secara kelembagaan, koordinasi pencapaian sasaran pembangunan dibagi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 37 SKPD yang terdiri dari 20 dinas, 8 kantor dan 9 badan.

B. Permasalahan:

- Kualitas layanan umum di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan. Kekurangan pelayanan birokrasi disebabkan antara lain: (1) kurangnya kompetensi aparatur pemerintah; (2) kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang; dan (3) kurangnya koordinasi intensif antarinstitusi.
- Pembangunan hukum yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, rendahnya disiplin berlalu lintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar.
- Secara kelembagaan, pencapaian sasaran pembangunan dibagi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan utama pembagian SKPD untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program pembangunan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan.
- SDM merupakan aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selalu melakukan pengelolaan SDM (aparatur) yang dimiliki secara komprehensif dan berkesinambungan. Kompetensi calon pejabat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penugasan seorang aparat untuk menduduki dan menyandang tugas jabatan tertentu.

C. Capaian Keberhasilan:

- Terdapat peningkatan produk hukum daerah selama tahun 2000-2005, yaitu 69,77 persen Peraturan Daerah dan 76,70 persen Surat Keputusan Bupati. Pada tahun 2005 terdapat 6 Peraturan Bupati, dan 1 Instruksi Bupati.
- Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan reformasi birokrasi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan kecamatan dan desa, sehingga kecamatan dan desa yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara merasa memperoleh manfaat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Analisis:

* Proyeksi Peluang:

- Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembangunan dan pelayanan publik akan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih cepat maju dan berkembang.
- Pemberian insentif pajak, kemudahan administrasi perijinan, dan jaminan kepastian hukum dan keamanan merupakan salah satu usaha untuk menarik investor.
- Potensi SDA dan keanekaragaman budaya merupakan modal dasar untuk meningkatkan iklim investasi yang akan terus berkembang dinamis.

* Proyeksi Ancaman:

- Kesiapan SDM dalam menghadapi era globalisasi, teknologi, dan informasi.
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan harus diimbangi dengan perumusan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.

* Proyeksi Permasalahan:

- Kelembagaan yang telah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

- Profesionalisme, kualifikasi, dan kompetensi SDM aparatur pemerintah belum dioptimalkan.
- Peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah. Perumusan kebijakan publik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan *good governance*.

*** Proyeksi Keberhasilan:**

- Terwujudnya pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan tegaknya supremasi hukum yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Terwujudnya kualitas aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi tinggi, dan profesional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab.
- Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan dan berwibawa serta bebas dari praktek-praktek KKN.

E. Output:

Prediksi kondisi hukum, kelembagaan, dan aparatur dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah:

- Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, pelayanan administrasi kepegawaian, budaya disiplin dan etos kerja, kualitas kebijakan kepegawaian, dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang lebih baik.
- Terwujudnya pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Terwujudnya sistem dan mekanisme perencanaan yang menjamin keterlibatan semua stakeholders.
- Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga akan terwujud pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kehendak rakyat.

2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan daerah meliputi:

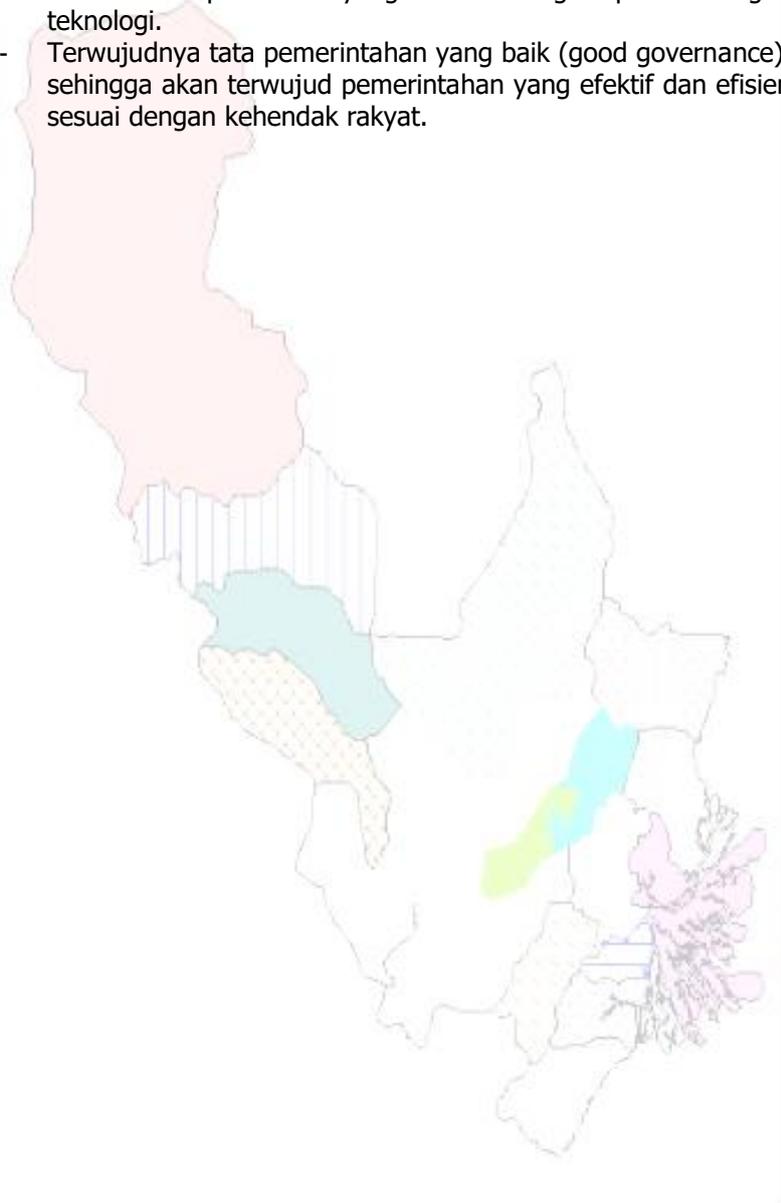
- Potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada sektor pertambangan dan penggalian sangat besar, sehingga

ditargetkan dan diperkirakan dapat dimanfaatkan secara hemat dan optimal selama 20-25 tahun ke depan.

- Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Persebaran penduduk yang semakin merata diantaranya karena ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) dan pengembangan kawasan pemukiman.
- Meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja.
- Meningkatnya usia harapan hidup melebihi usia harapan hidup rata-rata nasional
- Menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian, karena berkurangnya lahan untuk pertanian.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang diprediksi akan mencapai sekitar 7,26%.
- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian sebesar 11,38% dan sektor pariwisata sebesar 0,22% terhadap pembentukan PDRB.
- Terkendalinya laju inflasi pada kisaran 6,11%.
- Meningkatnya jumlah wisatawan akan berdampak terhadap terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat.
- Demokrasi politik lokal akan berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Meningkatnya permasalahan ketertiban sosial yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya tindak kejahatan, pencurian, dan pemalsuan.
- Meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang merupakan faktor pendukung kegiatan ekonomi, pengembangan sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Semakin tinggi tuntutan untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, rencana area pertanian, dan rencana area pertambangan.
- Semakin meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi, maka menuntut pembangunan jaringan infrastruktur komunikasi yang semakin meningkat.
- Semakin meningkatnya permintaan akan energi listrik dan kebutuhan air bersih, yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi.
- Semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah, pelayanan administrasi kepegawaian, budaya disiplin dan etos kerja,

kualitas kebijakan kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang lebih baik.

- Terwujudnya pengembangan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga akan terwujud pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kehendak rakyat.



BAB III

VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

3.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang memerlukan satu filosofi pembangunan yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah "BENA BENUA ETAM", yaitu kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menuju masyarakat madani.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah kabupaten, maka visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 adalah:

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI,
DAN SEJAHTERA "**

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus terukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera".

Adapun yang dimaksud dengan "**Maju**" adalah suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama. Kemajuan yang

diharapkan meliputi kemajuan dibidang ekonomi dan sosial budaya melalui pemberdayaan sumber daya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan lestari. Kemajuan dibidang ekonomi antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan regional, dan meningkatnya distribusi pendapatan. Kemajuan dibidang sosial budaya ditunjukkan dengan semakin membaiknya indikator kependudukan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Pola pemanfaatan sumber kekuatan daerah yang dilakukan harus mempertimbangkan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang, sehingga proses pembangunan akan tetap lestari sampai akhir jaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Mandiri" adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mampu mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada, serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri serta dapat saling mengisi di dalam memperbaiki taraf hidup mereka pada tataran pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Aspek penting yang dapat diukur adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya tanpa harus tergantung pada pihak luar. Pada tataran masyarakat, yang dimaksudkan dengan masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak. Pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunan daerah dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya tanpa harus tergantung pada pihak luar.

"Sejahtera" adalah mewujudkan suatu keadaan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius bagi seluruh warga masyarakat. Aspek penting yang harus mendapat perhatian adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya distribusi pendapatan. Dalam pembangunan kewilayahan harus diperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan semakin baiknya distribusi

pendapatan diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju** melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan *re-inventing government*; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranan masyarakat sipil; meningkatkan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan pemerintah daerah; memperbaiki kualitas layanan publik; meningkatkan budaya tertib hukum; menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil.
2. **Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri** melalui pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat; peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha; peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara; peningkatan kemandirian keuangan daerah. peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan Iptek; pengoptimalan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi; mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
3. **Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera** melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat; peningkatan pemerataan pembangunan dan pendapatan; mengurangi kemiskinan secara menyeluruh, peningkatan kinerja sektor pertanian dan perkebunan; peningkatan kinerja

sektor pariwisata; peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi; peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa; membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke perdesaan; peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat; mengembangkan jiwa kewirausahaan; peningkatan ketersediaan pasokan energi.

3.3. ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3.3.1. ARAHAN UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan visi **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera"**. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju

Untuk meningkatkan kemajuan tersebut pembangunan jangka panjang diarahkan untuk:

1. Kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki ketatapemerintahan yang baik (*good governance*), berkeadilan, dan demokratis yang berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya keberhasilan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan adil. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi publik.
2. Akuntabilitas publik merupakan kata kunci menuju terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan aturan hukum di tingkat daerah pada dasarnya bermanfaat untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dan menghambat aspek negatif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Jaminan penegakan Peraturan Daerah (Perda)

yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal.

3. Penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten yang profesional, efektif, berkompentensi tinggi, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui penerapan prinsip-prinsip *re-inventing goverment*, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah; serta penguatan lembaga legislatif.
5. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui: (1) Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; serta (2) Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
6. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (1) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (2) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (3) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; serta (4) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif

agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman informasi.

7. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

B. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri

Untuk meningkatkan kemandirian tersebut pembangunan jangka panjang diarahkan untuk:

1. Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM daerah untuk memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan.
2. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat diarahkan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap daerah lain. Sehingga diharapkan perekonomian daerah akan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi nasional/internasional.
3. Meningkatkan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha diarahkan untuk menyediakan sumber energi yang berasal dari daerah sendiri atau mencari sumber energi alternatif, sehingga akan mengurangi ketergantungan pasokan energi yang berasal dari luar daerah.
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara diarahkan untuk memperbaiki sistem transportasi dan fasilitas pendukungnya secara terpadu yang dapat menghubungkan semua wilayah/daerah dengan aman, nyaman, dan murah, sehingga arus manusia, barang, dan jasa menjadi lebih lancar.

5. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah diarahkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga semua sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari daerah sendiri.
6. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan. Kebebasan dan jaminan dalam menjalankan ajaran agama yang dianut diarahkan pada pembangunan sarana ibadah, mengembangkan sikap toleransi dan saling berkomunikasi antar pemeluk agama yang berbeda.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau oleh semua penduduk di setiap daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai usaha untuk melindungi ruang hidup manusia diarahkan dengan melakukan reklamasi daerah eks pertambangan/penggalian, meningkatkan konservasi alam di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, dan reboisasi.
9. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan Iptek. Pendidikan untuk mencetak SDM yang berkualitas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerataan pendidikan dasar sampai dengan SMU diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah warga Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di daerah diarahkan untuk meningkatkan tersedianya SDM dibidang pertambangan dan penggalian, pertanian, dan pariwisata, disamping keahlian ilmu sosial lainnya.
10. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri, sehingga harus dipelihara sebagai warisan untuk anak cucu. Di samping itu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pariwisata, sehingga tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah tujuan wisata dapat tercapai. Arah pengoptimalan dilakukan dengan membentuk cagar alam, suaka margasatwa, dan perlindungan dengan menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) secara taat asas dan ketat bagi setiap usaha eksploitasi sumber daya hayati.

11. Mengembangkan sektor-sektor berbasis sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan SDA yang tak dapat diperbarui harus diantisipasi dengan berusaha mentransformasikan ke arah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui. Pembangunan jangka panjang diarahkan pada peningkatan sektor pertanian, dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Pembangunan jangka panjang diarahkan pada peningkatan optimalisasi pemanfaatan SDA pada saat ini dengan menerapkan AMDAL yang ketat sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Hasil optimalisasi SDA diharapkan dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan sektor-sektor basis lainnya khususnya sektor pertanian, dan pariwisata

C. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera

Kemampuan sektor basis yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian. Orientasi pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan harus mampu mentransformasikan ke arah sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang bersifat lestari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan daya saing tersebut pembangunan jangka panjang diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan secara menyeluruh diarahkan pada pemberdayaan sumber daya ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi yang berbasis pada masyarakat dan lestari, misalnya: revitalisasi sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata.
2. Meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui program revitalisasi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan peranan sektor pertanian dalam pembangunan daerah. Dalam pembangunan 20 tahun ke depan pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk: (1) meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian yang ditempuh melalui perluasan lahan pertanian, peningkatan teknologi dan kualitas benih

serta penguasaan teknologi; (2) meningkatkan diversifikasi produk pangan dengan pengembangan pangan yang berbasis bahan baku lokal; (3) meningkatkan daya saing produk dan pengembangan industri berbasis pertanian; (4) mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (*high value crops*); (5) mengembangkan agroindustri dengan menjalankan prinsip-prinsip agribisnis; (6) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan; serta (7) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian.

3. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam (*adventure travel*), ekologi (*ecotourism*) dan budaya (*cultural travel*), melalui pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism/CBT*). Program Pariwisata Berbasis Masyarakat (PBM) diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitar lokasi wisata. Dengan demikian akan dapat diciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata.
4. Meningkatkan investasi yang terarah pada faktor-faktor produksi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis daerah.
5. Meningkatkan pembangunan daerah di tingkat kecamatan dan desa yang diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke perdesaan yang diarahkan untuk memenuhi ketersediaan jaringan infrastruktur dengan tujuan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dan meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa.
7. Mengembangkan jiwa kewirausahaan diarahkan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pembangunan daerah.

3.3.2. PERAN SUB WILAYAH PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025, maka penataan ruang dan wilayah dalam 20 tahun ke depan diarahkan bagi terwujudnya keserasian, kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola tata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi pengembangan. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT), sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Terpadu I (Wilayah Pantai/Pesisir)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu perikanan (tambak), pertambangan dan energi serta lokasinya strategis sebagai kawasan industri. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Muara Badak.

2. Wilayah Pengembangan Terpadu II (Wilayah Tengah)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu pertanian tanaman pangan, pariwisata dan pertambangan batu bara. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Tenggarong.

3. Wilayah Pengembangan terpadu III (Wilayah Hulu)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Tabang, Kembang Janggut, Kanohan, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan perikanan air tawar, kehutanan dan perkebunan. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Kota Bangun.

Pendekatan WPT ini diharapkan mampu menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (*growth pole*) yang secara umum diharapkan menjadi motor penggerak roda pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peranan kecamatan dalam pembangunan jangka panjang berdasarkan keunggulan komparatif yang dimilikinya sebagai berikut:

1. Kecamatan Muara Muntai, memiliki potensi perikanan yang baik sehingga dapat dikembangkan sebagai daerah sentra pengembangan perikanan terutama dengan sistem tambak. Disamping keberadaan danau Jempang, Tanjung Isuy, dan

rumah adat Lamin Lancong, maka dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata terutama wisata alam.

2. Kecamatan Loa Kulu, memiliki potensi lahan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan, dan memiliki cadangan batubara yang banyak, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan perkebunan.
3. Kecamatan Loa Janan, memiliki potensi lahan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan, dan memiliki cadangan batubara yang banyak, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan perkebunan.
4. Kecamatan Anggana, memiliki potensi minyak bumi, perikanan dan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai Kawasan Industri.
5. Kecamatan Muara Badak, memiliki potensi minyak bumi, perikanan dan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai Kawasan Industri.
6. Kecamatan Tenggarong, sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan dikembangkan memiliki beberapa potensi wisata budaya antara lain: Istana Kesultanan Kutai, Museum Mulawarman, Museum Kayu Tuah Rimba, Pulau Kumala, dan wisata alam Waduk Panji Sukarame, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai daerah tujuan wisata terutama wisata budaya.
7. Kecamatan Sebulu, memiliki potensi lahan yang baik untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan terutama karet, kelapa dan kelapa sawit, sehingga arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis perkebunan.
8. Kecamatan Kota Bangun, memiliki potensi budidaya tanaman pangan dan perkebunan dan potensi wisata alam danau murung, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai kawasan agroindustri dan sebagai daerah tujuan wisata alam.
9. Kecamatan Kenohan, memiliki potensi budidaya tanaman padi ladang dan jagung, ketela pohon, dan ubi jalar, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan.

10. Kecamatan Kembang Janggut, memiliki potensi untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan (kopi dan kelapa), dan produksi hasil hutan, maka arah pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.
11. Kecamatan Muara Kaman, sebagai daerah bekas pusat pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura yang memiliki peninggalan arkeologi dan budaya yang unik, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pariwisata budaya yang berbasis masyarakat. Di samping itu tanaman karet sesuai dengan lahan yang tersedia, maka dapat pula dikembangkan sebagai daerah pertanian agribisnis perkebunan.
12. Kecamatan Tabang, yang memiliki potensi lahan untuk tanaman pangan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan.
13. Kecamatan Samboja, memiliki potensi dasar budidaya tanaman pangan dan memiliki wisata alam Bukit Bangkirai, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan sebagai daerah tujuan wisata alam.
14. Kecamatan Muara Jawa, memiliki potensi dasar lahan yang sesuai untuk tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, maka arah pengembangannya adalah
15. Kecamatan Sanga-Sanga, memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai kawasan industri.
16. Kecamatan Tenggarong Seberang, memiliki potensi lahan yang cocok untuk tanaman pangan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan.
17. Kecamatan Marang Kayu, memiliki potensi dasar perkebunan karet dan kelapa, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis perkebunan.
18. Kecamatan Muara Wis, memiliki potensi dasar pada tanaman kehutanan antara lain: mahoni, albasia, pinus, acasia, dan leusaena, maka arah pengembangannya adalah pengembangan industri pengolahan hasil hutan.

3.4. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai arah dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka ditetapkan visi antara untuk periode 5 tahun pembangunan. Visi antara selama 20 tahun periode pembangunan jangka panjang 2005-2025 Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Tahun 2005-2010: Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terselenggaranya pemerintahan kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keseragaman, dan demokrasi.
- Tahun 2011-2015: Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tersedianya sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
- Tahun 2016-2020: Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari.
- Tahun 2021-2025: Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari.

Setiap sasaran pokok dalam 3 (tiga) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

3.4.1. RPJMD Ke-1 (2005 – 2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan pada tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui.

Sasaran pembangunan pada RJMD ke-1 adalah: 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, 3) Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) Meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan. 2) Menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik. 3) Melakukan revitalisasi pertanian. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, 2) Penyediaan sarana produksi pertanian, 3) Pengembangan produk pertanian unggulan, 4) Melakukan penggalian potensi wisata, 5) Meningkatkan sarana dan prasarana publik, 6) Meningkatkan daya beli masyarakat, 7) Membuka daerah yang terisolir, 8) Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, 9) Meningkatkan pembangunan diperkotaan dan perdesaaan.

3.4.2. RPJMD Ke-2 (2011 – 2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Kutai Kartanegara di segala bidang dengan menekankan upaya pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pertanian dan perkebunan dalam artian luas, dan pengembangan kepariwisataan.

Sasaran pembangunan pada RJMD ke-2 adalah: 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi, 2) Meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, 3) Meningkatnya jumlah dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas, 3) Peningkatan kepariwisataan. Beberapa strategi

yang dapat ditempuh antara lain: 1) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual, 2) Melakukan revitalisasi pertanian, 3) Pengembangan potensi dan promosi wisata.

3.4.3. RPJMD Ke-3 (2016 – 2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari. Di samping itu pembangunan diarahkan pula untuk pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan (pendidikan, pertanian dalam artian luas, dan kepariwisataan).

Sasaran pembangunan pada RPJMD ke-3 adalah: 1) Meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan oleh: a) sektor pertanian sebagai *leading sector* pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi, b) meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c) semakin beranekaragamnya produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pangan lokal, d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian dipasar lokal, nasional, dan internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (*high value crops*); dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja di sektor pertanian. 2) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam dan budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 3) Meningkatnya APS, meningkatnya kelulusan dalam UAN, dan meningkatnya masyarakat melek aksara. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Pengembangan pertanian dan perkebunan dalam artian luas, 3) Peningkatan kepariwisataan. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual, 2) Melakukan revitalisasi pertanian, 3) Pengembangan potensi dan promosi wisata.

3.4.4. RPJMD Ke-4 (2021 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari. Pembangunan 5 (lima) tahun yang keempat juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, meningkatkannya kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari. Di samping itu pada tahap RPJMD ke-4 harus mampu meletakkan dasar yang kokoh untuk memulai tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Sasaran pembangunan pada RJMD ke-4 adalah: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi, 2) Meningkatkan jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. 3) Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, 3) Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, 4) Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah. 6) Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya. 7) Meningkatkan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat. 7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memenuhi unsur-unsur utama sebagai berikut: a) meningkatnya partisipasi masyarakat; b) tegaknya supremasi hukum; c) meningkatnya transparansi; d) peduli pada stakeholders; e) berorientasi pada konsensus; f) meningkatnya kesetaraan; g) meningkatnya efektifitas dan efisiensi; h) meningkatnya akuntabilitas; dan i) mempunyai visi strategis. 8) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang

bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Menciptakan daerah pusat pertumbuhan baru, 3) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah, 4) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kabupaten. 5) Meningkatkan pemanfaatan analisis dampak lingkungan untuk memulai proyek baru. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: 1) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mental spiritual, 2) Meningkatkan pembangunan kawasan industri baru, 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, 4) Mensinergikan pembangunan ruang terpadu dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah bagi lembaga-lembaga daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka:

1. Bupati selaku kepala pemerintah di daerah berkewajiban menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga daerah lainnya, baik pemerintah maupun swasta, berkewajiban melaksanakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
3. RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berupa rencana pembangunan daerah 5 tahunan yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur serta sasaran/target yang akan dicapai, yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi tergantung kepada peran aktif masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintah, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Setiap sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah harus dikelola dengan hati-hati dan dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tentram, dan damai.

(Penjabaran Misi 1)

Visi Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025:								
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”								
Misi 1:								
Perwujudan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju								
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara								
S1: Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Reinventing Government</i>	S2: Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh	S3: Memperkuat peranan masyarakat sipil	S4: Peningkatan kualitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal	S5: Menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat	S6: Melakukan pembenahan struktur kelembagaan pemerintah daerah	S7: Peningkatan kualitas layanan publik	S8: Peningkatan budaya tertib hukum	S9: Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil dan memihak pada rakyat kecil
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara								
A1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki ketatapemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), berkeadilan, dan demokratis yang berlandaskan hukum	A2: Mengembangkan budaya politik	A3: Mewujudkan akuntabilitas publik	A4: Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi	A5: Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik	A4: Menyempurnakan struktur kelembagaan pemerintah Kab Kutai Kartanegara yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi	A6: Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah	A7: Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara	A3: Mewujudkan akuntabilitas publik
Fokus dari Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara								
F1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi publik	F2.1: Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media	F3: Jaminan penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal	F4.1: Proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik	F5.1: Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen	F4.1: Proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah kabupaten yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi, serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik	F6.1: Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui penerapan prinsip-prinsip <i>re-inventing government</i>	F7.1: Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	F3: Jaminan penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal

	F2.2: Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa		F4.2: Upaya mewujudkan efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	F5.2: Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas	F4.2: Upaya mewujudkan efektivitas kerja yang tinggi dari setiap satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	F6.2: Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	F7.2: Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat	
				F5.3: Menciptakan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada		F6.3: Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah	F7.3: Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik	
				F5.4: Memanfaatkan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi secara efektif		F6.4: penguatan lembaga legislatif		

(Penjabaran Misi 2)

Visi Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025:											
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA"											
Misi 2:											
Perwujudan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang mandiri											
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara											
S1: Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	S2: peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	S3: peningkatan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	S4: peningkatan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	S5: peningkatan kemandirian keuangan daerah, peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	S6: peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S7: meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan Iptek	S8: pengoptimalan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	S9: mempersiapkan sektor-sektor berbasis sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	S10: mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan		
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara											
A1: Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan	A2: Meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	A3: Meningkatkan ketersediaan energi untuk masyarakat dan dunia usaha	A4: Meningkatkan jumlah dan kualitas moda transportasi darat, laut, dan udara	A5.a: Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	A5.b: Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan	A6.a: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	A6.b: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai usaha untuk melindungi ruang hidup manusia	A7: Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan penguasaan Iptek	A8: Mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	A9: Mengembangkan sektor-sektor berbasis sumber daya yang dapat diperbarui (renewable resources) sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi	A10: Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang berkesinambungan

F1: peningkatan kualitas SDM daerah	F2.1: menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat	F3.1: menyediakan sumber energi yang berasal dari daerah sendiri	F4: memperbaiki sistem transportasi dan fasilitas pendukungnya secara terpadu yang dapat menghubungkan semua wilayah/daerah dengan aman, nyaman, dan murah	F5.a.1: mengurangi ketergantungan sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat	F5.b.1: pada pembangunan sarana ibadah, mengembangkan sikap toleransi dan saling berkomunikasi antar pemeluk agama yang berbeda	F6.a.1: sarana dan prasarana kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau oleh semua penduduk di setiap daerah	F6.b.1: reklamasi daerah eks pertambangan/ penggalian	F7.1: Pemerataan pendidikan dasar sampai dengan SMU diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah warga Kabupaten Kutai Kartanegara	F8.1: Membentuk cagar alam, suaka margasatwa, dan perlindungan	F9.1: Peningkatan sektor pertanian, dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya	F10.1: Peningkatan optimalisasi pemanfaatan SDA pada saat ini dengan menerapkan AMDAL yang ketat sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga
	F2.2: mengurangi ketergantungan perekonomian daerah terhadap daerah lain	F3.2: mencari sumber energi alternatif					F6.b.2: meningkatkan konservasi alam di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam	F7.1: Pendidikan tinggi diarahkan untuk meningkatkan tersedianya SDM dibidang pertambangan dan penggalian, pertanian, dan pariwisata, disamping keahlian ilmu sosial lainnya	F8.2: Menerapkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) secara taat asas dan ketat bagi setiap usaha eksploitasi sumber daya hayati		F10.2: Menggunakan hasil optimalisasi SDA sebagai modal untuk pengembangan sektor-sektor basis lainnya khususnya sektor pertanian, dan pariwisata
							F6.b.3: reboisasi				

(Penjabaran Misi 3)

Visi Pembangunan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"									
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera									
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara									
S1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan	S2: Peningkatan pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan	S3: Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perkebunan	S4: Peningkatan kinerja sektor pariwisata	S5: Peningkatan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	S6: Peningkatan pembangunan daerah kecamatan dan desa dalam rangka pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	S7: Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sampai ke pedesaan	S8: Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	S9: Mengembangkan jiwa kewirausahaan	S10: Peningkatan ketersediaan pasokan energi
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara									
A1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat	A2: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan secara menyeluruh	A3: Meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui program revitalisasi pertanian	A4: Meningkatkan sektor pariwisata melalui program pariwisata berbasis masyarakat (PBM)	A5: Meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang serasi	A6: Meningkatkan pembangunan daerah di tingkat kecamatan dan desa yang diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	A7: Tersedianya infrastruktur yang berkualitas di pedesaan	A8: Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	A9: Pengembangan jiwa kewirausahaan guna mengurangi jumlah pengangguran	A10: Tersedianya pasokan energi
Fokus dari Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara									
F1: Pemberdayaan sumber daya ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi berbasis pada masyarakat dan lestari		F3.1: Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian melalui perluasan lahan, peningkatan teknologi, kualitas benih dan penguasaan teknologi	F4.1 : Meningkatkan kinerja pariwisata berbasis wisata alam, ekologi dan budaya	F5.1:	F6.1: Peningkatan investasi yang terarah pada faktor-faktor produksi yang dimiliki masyarakat lokal sehingga dapat mendorong perkembangan bisnis di daerah	F8.1: Memenuhi ketersediaan jaringan infrastruktur dengan tujuan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dan meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa	F9.1:	F10.1: Meningkatkan pelatihan kewirausahaan	

		F3.2: Meningkatkan diversifikasi produk pangan dengan pengembangan pangan yang berbasis bahan baku lokal		F5.2:	F6.2:	F8.2:	F9.2:	F10.2: Meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	
		F3.3 : Meningkatkan daya saing produk dan pengembangan industri berbasis pertanian dan mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi							
		F3.4 : Mengembangkan agroindustri, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat desa dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian							



BAPPEDA KUKAR